

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 15 Juni 2026
Kepala Bapelitbangda

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2025.

Adapun pembuatan LAKIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Lapoan Kinerja Instansi Pemerintah.

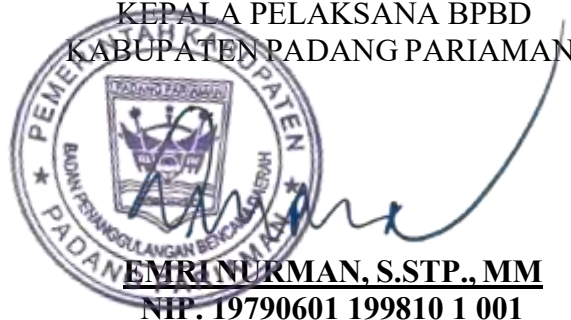
Laporan Kinerja Pemerintahan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman memberikan gambaran tentang tolok ukur pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaien Padang Pariaman dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam menyusun Lakip ini kami telah berupaya secara maksimal namun dirasa masih ada kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan di masa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat hendaknya.

Limpato, 02 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



EMRINURMAN, S.STP., MM
NIP. 19790601 199810 1 001



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana.....	1
B. Permasalahan Utama (Statgis Issued) Penanggulanagn Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman.....	5
C. Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi.....	9
2. Misi.....	10
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	12
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	14
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024.....	14
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	16
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah	17
4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini degan Target da Realisasi Provnsi Sumatera Barat.....	18
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	23
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
A. Langkah Ke Depan.....	36
LAMPIRAN.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan OPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 18 Tahun 2009 Tanggal 24 November 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Daerah (SOTK) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara ex officio dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

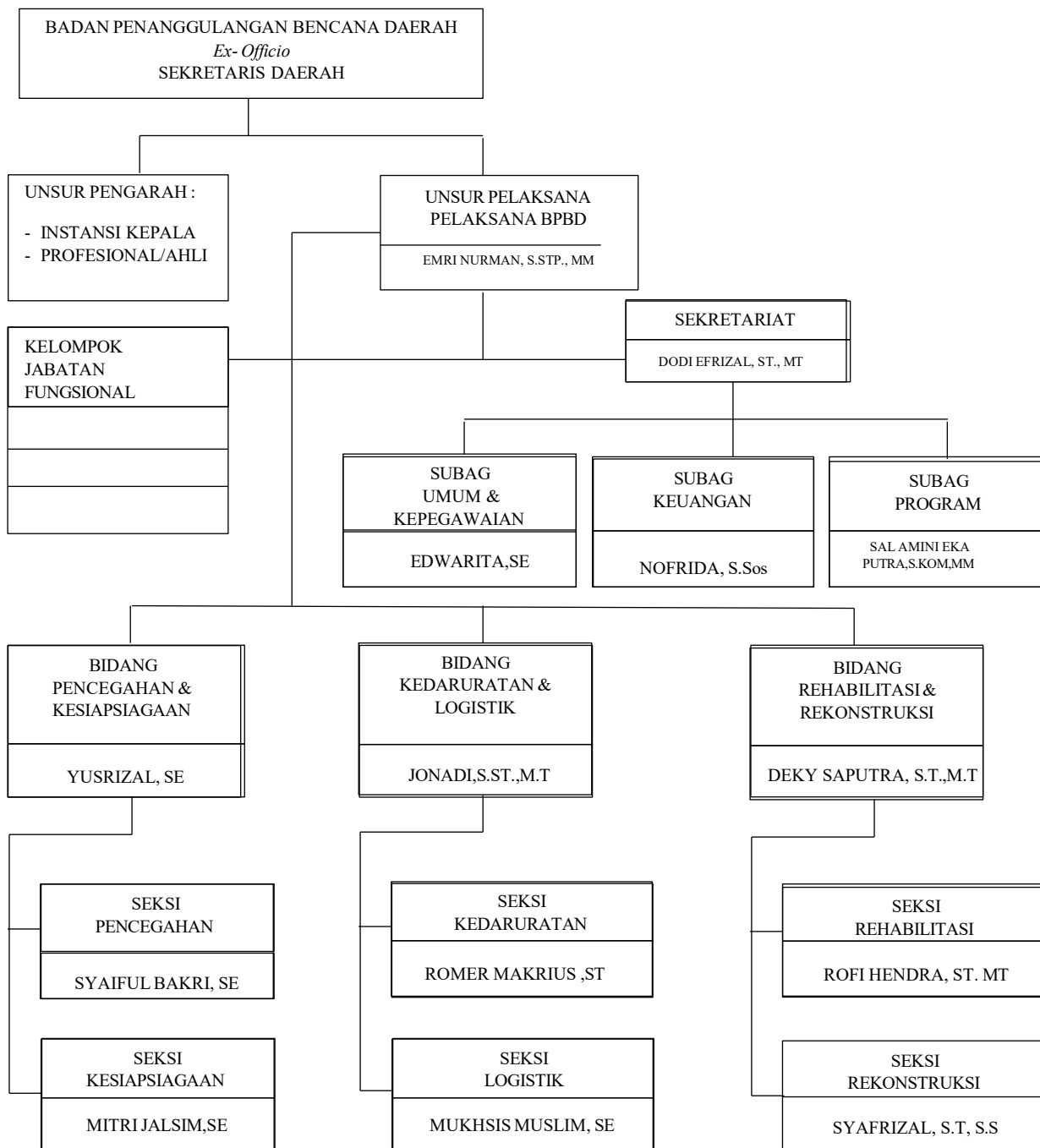
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyas elain didukung oleh tiga bidang dan satu sekretariat.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA





STRUKTUR JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MENURUT ESELONERING

No.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1	Kepala	V			
2	Sekretaris		V		
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		V		
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		V		
5.	Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekontruksi		V		
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			V	
7.	Kasubag Keuangan			V	
8.	Kasubag Program			V	
9.	Kasi Pencegahan			V	
10	Kasi Kesiapsiagaan			V	
11.	Kasi Kedaruratan			V	
12.	Kasi Logistik			V	
13.	Kasi Rehabilitasi			V	
14.	Kasi Rekontruksi			V	
15	Staf				17

Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dikerangkakan dengan diwujudkannya good governance melalui peningkatan pelayanan publik dan kualitas SDM oleh segenap jajaran manajemen dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman memaklumkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan secara harmonis mewujudkan visi Kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana.

Makna visi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah turut membantu mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintah yang diembannya, untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman Siaga, Tanggap dan Tangguh dalam menghadapi bencana di Padang Pariaman.

Pernyataan Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai berikut:

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah rawan bencana, dimana terdapat 13 jenis bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam upaya mengoptimalkan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Padang



Pariaman serta Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Isu strategis BPBD yaitu :

1. Kabupaten Padang Pariaman berada pada zona rawan bencana.
2. Jumlah bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, misalnya banjir, longsor dan angin puting beliung.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana yang belum memadai.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menyajikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Padang Pariaman tahun 2021-2026 yang di resmikan pada tanggal 24 Agustus 2021, Melalui Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode 2021-2026 Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025. Target-target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis BPBD Padang Pariaman disusun berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran strategis dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BPBD Padang Pariaman yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Visi

Setelah tanggal 24 Agustus 2021 diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 adalah



“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Unggul
BERkelanjutan | : | Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| Religius | : | Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. |
| SeJAhtera | : | suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. |
| BerbudaYA | : | suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu. |

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 terdapat 7 buah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pada Misi tersebut BPBD Padang Pariaman mengacu kepada misi ke enam. BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Adapun tujuan dan sasaran strategis OPD BPBD Kab. Padang Pariaman yang tertuang pada Renstra BPBD Kab. Padang Pariaman Periode 2021-2026. Adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi : Padang Pariaman Berjaya				
Misi Ke 5 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif bersih, berkeadilan,demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional aspiratif, partisipatif dan trasnparan.				



1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten Yang dikeluarkan Oleh Kemenpan RB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat
Misi Ke 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat				
1	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera."

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.



MAJU

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk:

1. **Ekonomi:** Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. **Pendidikan dan Kesehatan,** Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. **Tata Kelola Pemerintahan,** Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

SEJAHTERA

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi:

1. **Kesejahteraan Ekonomi:** Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
2. **Kesehatan dan Pendidikan,** Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.



3. Kehidupan Sosial dan Budaya, Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD

Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026-2029 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Adapun tujuan dan sasaran strategis OPD BPBD Kab. Padang Pariaman yang tertuang pada Renstra BPBD Kab. Padang Pariaman Periode 2025-2029. Adalah sebagai berikut:

VISI: Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja, keterbukaan informasi, pengawasan internal	1. Meningkatkan Sistem Pengawasan, Pelaporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
MISI IV: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Menurunnya resiko bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 2. Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	1. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana melalui Edukasi, Pelatihan, dan Simulasi 2. Penguatan Sistem dan Kapasitas Tanggap	1. Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Masyarakat Melalui Pelatihan dan Simulasi Berkala 2. Mengoptimalkan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas



	3. Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana	Darurat Bencana yang Cepat, Terkoordinasi, dan Berbasis Teknologi Informasi 3. Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Sektor Perumahan, Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi Produktif, Sektor Sosial, dan Lintas Sektor Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Sektor dalam Tanggap Darurat 3. Membangun Mekanisme Koordinasi Terpadu untuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
--	--	--	---

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 termasuk untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 4 sasaran strategis dan 5 indikator maka dipilihlah 2 sasaran strategis dan 2 indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.



Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2021-2026 :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten Yang dikeluarkan Oleh Kemenpan RB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	A
2	Penguatan Layanan Kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
			Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
			Meningkatnya pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100%



Berdasarkan Renstra 2025-2029:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Yang dikeluarkan Oleh Kemenpan RB	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,01
2	Menurunnya resiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	65 %
			Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %
			Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	100 %

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025 menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus penguatan arah kebijakan organisasi sebagaimana tertuang dalam peralihan Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029. Pada kedua periode Renstra tersebut, BPBD menempatkan Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tujuan utama, dengan indikator kinerja berupa nilai SAKIP/AKIP perangkat daerah yang ditargetkan mencapai kategori A. Hal ini mencerminkan komitmen BPBD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan daerah.



Di sisi substansi pelayanan kebencanaan, Renstra 2021–2026 menitikberatkan pada penguatan layanan kebencanaan melalui Nagari Tangguh Bencana, dengan sasaran strategis yang mencakup peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Target kinerja pada periode ini menunjukkan fokus pada pemenuhan layanan secara menyeluruh kepada masyarakat, ditandai dengan target 100 persen untuk layanan pencegahan, kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi, dan 80 persen untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selanjutnya, dalam Renstra 2025–2029, arah kebijakan tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan yang lebih outcome-oriented, yaitu menurunkan risiko bencana. Pendekatan ini menegaskan pergeseran dari sekadar penguatan layanan menuju upaya sistematis dalam pengurangan risiko bencana. Sasaran strategis difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan nagari, kecepatan dan efektivitas penanganan darurat, serta peningkatan mutu penanggulangan pascabencana, dengan seluruh indikator ditargetkan mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan optimisme sekaligus dorongan kuat agar seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh, serta seluruh wilayah rawan memperoleh layanan kebencanaan yang memadai.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana melalui penguatan tata kelola organisasi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Peningkatan akuntabilitas organisasi ditargetkan melalui capaian nilai Evaluasi SAKIP sebesar 85 (kategori A). Dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, ditargetkan 65% warga negara memperoleh layanan kebencanaan melalui edukasi, mitigasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pada penanganan keadaan darurat bencana, ditargetkan 87% warga negara mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat dan tepat. Selain itu, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditargetkan 85% sektor terdampak, meliputi perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor lainnya, memperoleh penanganan pemulihan secara optimal.



Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, responsif, dan akuntabel. Sasaran strategis yang ditetapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 guna menyelaraskan sasaran dan indikator kinerja dengan dinamika kebutuhan organisasi, kebijakan daerah, serta penguatan orientasi hasil pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut tidak mengubah substansi utama tujuan organisasi, melainkan mempertegas arah kebijakan dan penyempurnaan indikator agar lebih terukur dan relevan.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	A
2	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
4	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100%



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,01
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Persentase Nagari Yang Mendapatkan Layanan Kesipasiagaan Bencana	65%
3	Meningkatnya Kecepatan dan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana di Daerah	Persentase Kejadian Bencana yang dapat ditangani	100%
4	Meningkatkan Mutu Penanggulangan Pasca Bencana	Persentase Penanggulangan Pasca Bencana	100%

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap Renstra BPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman periode terbaru. Secara umum, perubahan tersebut tidak mengubah fungsi utama BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tetapi menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja agar lebih **spesifik, terukur, relevan, dan selaras dengan indikator kinerja daerah**.

Perubahan yang paling signifikan terdapat pada indikator bidang **pencegahan dan kesiapsiagaan**, yaitu dari indikator berbasis **cakupan pelayanan kepada warga negara** menjadi **cakupan layanan kepada nagari**. Pergeseran ini mencerminkan pendekatan yang lebih berbasis wilayah dan kelembagaan sehingga lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan Nagari Tangguh Bencana.

Pada bidang **penanganan darurat**, indikator diarahkan untuk mengukur kemampuan BPBD dalam menangani setiap kejadian bencana secara cepat dan efektif, sedangkan pada bidang **pasca bencana**, indikator disederhanakan agar lebih fokus pada keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja ini diharapkan mampu



meningkatkan kualitas pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (BPBD) telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam evaluasi tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Tahun 2025 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja pada Tujuan di BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2025 :

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki beberapa sasaran strategis adapun capaian Kinerja BPBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	Nilai	A	A	100	Berhasil
2	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100%	Berhasil
3	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100%	Berhasil
4	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Persen	100	100	100%	Berhasil

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (80,01)	A (81)	101	Berhasil
2	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	Persen	65	100	100	Berhasil
3	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	Persen	100	100	100	Berhasil
4	Meningkatk mutu penanggulang an pasca bencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	Persen	100	100	100	Berhasil

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, seluruh sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah terlaksana dengan sangat baik dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal. Seluruh indikator kinerja mencapai target, bahkan pada beberapa aspek melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kebencanaan secara menyeluruh.

Berdasarkan Renstra Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran strategis Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan dan Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana dan berdasarkan Renstra BPBD tahun 2026-2030 BPBD Padang Pariaman memiliki sasaran strategis Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah dan Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana . Indikator sasaran strategis tersebut kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai BPBD.

Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya, yaitu:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap.
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2025

	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
---	---

Pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki satu indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat

Tabel 3.3 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	Nilai	A	A	100	Berhasil

Capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah” menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada kategori A sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 100% dan interpretasi “Berhasil”.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025

Tabel 3.4 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	Nilai	A	A	100	Berhasil

**Berdasarkan Resntra 2021-2025*

Pada indikator strategis pertama yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat telah berhasil mencapai target yang diinginkan, pada tahun 2025 BPBD Kabupaten Padang Pariaman berhasil mendapatkan nilai SAKIP A hasil dari penilaian Inspektorat.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025

dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis pertama pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2024 dan 2025 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	A	A	A	100%	Berhasil

** Berdasarkan Resntra 2021-2025*

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah

Perbandingan anantara realisasi pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada sasaran strategis pertama BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.6 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat		B	BB	BB	A	A	A	AA	BB	A	A	A	A	-	Berhasil

Pada kondisi awal Renstra 2021-2026 yaitu pada tahun 2021 Pada indikator sasaran strategis pertama Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat ditargetkan nilai yang Sakip BB sedangkan pada akhir periode (tahun 2026) ditargetkan nilai Sakip yang didapatkan adalah AA. Dari hasil capaian didapat pada tahun 2022 hingga tahun 2025 BPBD telah berhasil mendapatkan nilai SAKIP yaitu A.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BPBD telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan dengan meningkatkan nilai SAKIP BPBD Kab. Padang Pariaman. Adapun Indikator Pada sasaran pertama ini adalah Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat.

Nilai SAKIP BPBD hasil dari evaluasi Inspektorat pada Tahun 2024 mendapatkan nilai A dan untuk nilai SAKIP BPBD Tahun 2025 mendapatkan nilai A. artinya dengan capaian ini untuk nilai SAKIP BPBD Pada Tahun 2025

dapat dinyatakan sangat berhasil.

Dalam upaya meningkatkan hasil penilaian SAKIP BPBD Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa hal dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan BPBD.

Berhasilnya pencapaian target indikator ini pada tahun 2025 ikut dipengaruhi oleh:

- Sudah terstrukturnya penyusunan laporan evaluasi kinerja yang dilaporkan.
- Sudah sesuai dokumen-dokumen pendukung yang dibuat.
- Sudah lebih terarah dan berbasis kinerja program kegiatan yang dilaksanakan.
- Digunakannya aplikasi SIMAK Kinerja dalam pengumpulan data kinerja BPBD dan dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Melaksanakan rapat evaluasi internal yang dilaksanakan selalu ditindaklanjuti secara berjenjang agar tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja
- Dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum dapat terukur dengan baik.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal

e. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sebuah indikator yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat. Dalam upaya meningkatkan hasil penilaian Evaluasi SAKIP BPBD Kab. Padang Pariaman didukung oleh program Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan pendukung dalam pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
 - Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Renja 2025, Renja Perubahan 2025, RKA 2025, RKAP 2025, DPA 2025, dan Perubahan DPA 2025 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.
- b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan Laporan LPPD Tahun 2025, LAKIP 2025 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran di bagian Sekretariat, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 98,63 = 1,37\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 1,37 = 1,37\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **1,37 %**

Tabel 3.7

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	100%	98,63%	1,37%

3. REALISASI KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
---	--

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025

Tabel 3.8 Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,01	81	101 %	Berhasil

Capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai AKIP Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar 81 dari target 80,01, dengan tingkat capaian 100% dan interpretasi “Berhasil”.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.9

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	80,01	81	100%	Berhasil

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah

**Tabel. 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP
Perangkat Daerah 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah		80	80,01	80,5	81	81,5	82	80,01	80,5	81	81,5	82	Berhasil

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menunjukkan hasil yang sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar 80,01 dari kondisi awal 80, dan telah sejalan dengan target jangka menengah yang direncanakan secara bertahap hingga mencapai nilai 82 pada tahun 2029.

Realisasi kinerja tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga dapat diinterpretasikan “Berhasil”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dengan capaian tersebut, diharapkan tren peningkatan kinerja dapat terus dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menunjukkan hasil yang berhasil dengan tingkat capaian 100%, dimana nilai AKIP Perangkat Daerah

meningkat dari kondisi tahun 2024 pada kategori A menjadi realisasi 81 pada tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,01.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh perangkat daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta optimalisasi pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, peran aktif Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan evaluasi turut mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain penguatan koordinasi antar unit kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja. Ke depan, alternatif solusi yang terus dilakukan adalah menjaga konsistensi penerapan SAKIP, meningkatkan kualitas indikator kinerja yang lebih terukur, serta memperkuat monitoring dan evaluasi agar capaian kinerja dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sebuah indikator yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat. Dalam upaya meningkatkan hasil penilaian Evaluasi SAKIP BPBD Kab. Padang Pariaman didukung oleh program Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan pendukung dalam pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.

- Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Renja 2025, Renja Perubahan 2025, RKA 2025, RKAP 2025, DPA 2025, dan Perubahan DPA 2025 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan Laporan LPPD Tahun 2025, LAKIP 2025 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran di bagian Sekretariat, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 98,63 = 1,37\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 1,37 = 1,37\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **1,37 %**

4. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026



Sasaran Strategis 2 Renstra 2021-2026:
Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2025		%	Inter-pestasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100 %	100%	Berhasil

Capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan” menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan realisasi sebesar 100 dari target 100, dengan tingkat capaian 100% dan

interpretasi “Berhasil”.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2024 dan 2025 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	119%	100%	100 %	100%	Berhasil

Pada tahun 2024, sasaran strategis adalah **"Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan"** dengan indikator **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**. Realisasi kinerja mencapai **119%**, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat telah terlaksana melebihi target melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan, simulasi kebencanaan, dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian
Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	45	50	55	100	65	70	3,86	55,87	101	119	100	0	Berhasil

Dimana pada sasaran Meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 45% dan tahun 2026 ditargetkan sebanyak 70%. Pada tahun 2025 capaiannya hanya sampai pada 100% dari seluruh penduduk namun pada tahun 2025 BPBD Kab. Padang Pariaman berhasil memberikan layanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan sebanyak 100% dari seluruh masyarakat di kabupaten padang Pariaman.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Adapun indikator yang ingin dicapai dari sasaran tersebut adalah Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Persentase dari indikator didapatkan dari hasil pembagian jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi dengan jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana yang kemudian dikalikan dengan 100%

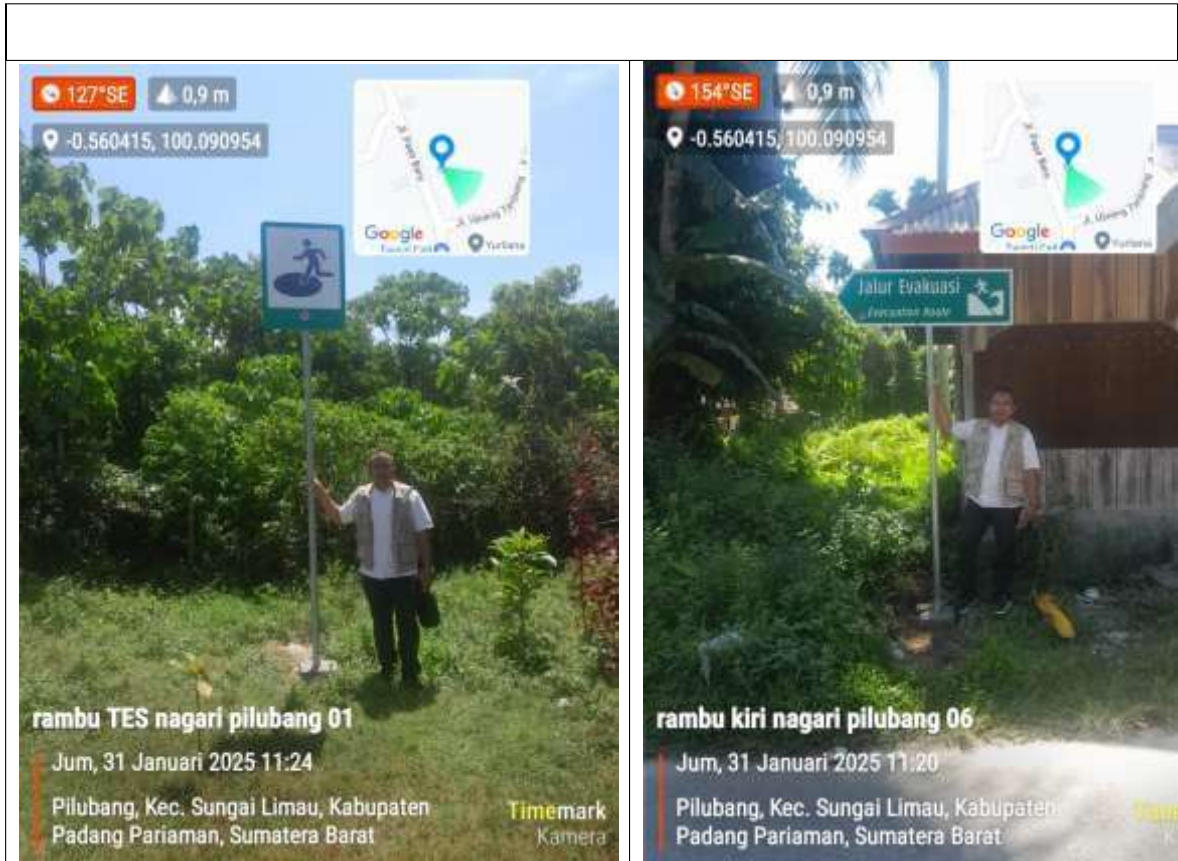
Tabel 3.14 Perbandingan antara target dan capaian jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Target Warga Negara yang Berada di Kawasan Bencana Prioritas (Jiwa)	Capaian Warga Negara yang Mendapatkan Layanan (Jiwa)	Persentase (%)
300.832	308.781	100%

Pada tahun 2025 didapatkan capaian sebesar 100 % hasil dari perhitungan 308.781 warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi dengan 300.832 jiwa warga negara yang berada di kawasan rawan bencana Prioritas BPBD Kabupaten Padang Pariaman (Banjir Bandang, Banjir, Longsor, Tsunami).

Keberhasilan capaian tersebut dapat terlaksana akibat beberapa layanan yang telah dilakukan oleh BPBD dalam upaya meningkatkan warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Adapun beberapa layanan tersebut adalah:

1. Pemasangan Rambu Mitigasi Bencana Tsunami





BPBD Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan dari BNPB melalui Program *Indonesia Disaster Resilience Initiative Project* (IDRIP). Salah satu bantuan yang menjadi program adalah pemasangan plang rambu mitigasi bencana Tsunami di 6 (enam) nagari, yaitu Nagari Katapiang, Nagari Ulakan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Nagari Pilubang, Nagari Kuranji Hilir, dan Nagari Malai V Suku total plang yang dipasang berjumlah 92 Unit. Pemasangan plang rambu mitigasi bencana ini menjadi salah satu upaya mitigasi bencana tsunami yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Padang Pariaman.

2. Sosialisasi dan Latihan Evakuasi Mandiri Bencana Gempabumi



BPBD Kab. Padang Pariaman melaksanakan kegiatan sosialisasi dan latihan evakuasi mandiri bencana gempabumi di SMPN 4 VII Koto. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2025. Pelaksanaan latihan evakuasi mandiri dilaksanakan dengan simulasi bencana gempabumi, melaksanakan pendataan korban, evakuasi korban, serta pertolongan pertama saat keadaan darurat. Akhir dari kegiatan latihan evakuasi mandiri dengan melaksanakan evaluasi bersama.

3. Sosialisasi Pemasangan *Early Warning System* (EWS) dan Survey Lokasi di Nagari Ulakan dan Nagari Katapiang

KEGIATAN SOSIALISASI



KEGIATAN SURVEY LOKASI PEMASANGAN EWS

NAGARI ULAKAN



NAGARI KATAPIANG



BPBD Kab. Padang Pariaman mendapatkan bantuan *Early Warning System* (EWS) atau system peringatan dini tsunami dari BNPB melalui Program *Indonesia Disaster Manajemen Resilience Initiatives Project* (IDRIP) untuk Tahun 2025. Adapun nagari yang mendapatkan bantuan EWS ini adalah Nagari Ulakan dan Nagari Katapiang dengan jumlah satu per nagari.

4. Sosialisasi Pemasangan HF Radar Tsunami di Nagari Tapakih



Sehubungan dengan potensi ancaman *Megathrust* Mentawai yang berpotensi Tsunami di Sumatra Barat, Kab. Padang Pariaman mendapatkan bantuan pembangunan HF Radar Tsunami melalui BMKG St. Geofisika Padang Panjang yang berfungsi untuk memonitoring gelombang laut dan *warning* tsunami. Berdasarkan kajian, pembangunan pemasangan HF radar tsunami tersebut bertempat di Pantai Tiram, Nagari Tapakih, Kec. Ulakan Tapakih.

5. Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempabumi (Upaya dalam Mengurangi Risiko Bencana dan Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi Bencana Gempabumi) di SD IT Al Rasyid



BPBD Kab. Padang Pariaman melaksanakan kegiatan sosialisasi dan di SD IT AL Rasyid Nagari Lareh Nan Panjang. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan pemberian materi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Padang Pariaman terkait Bencana Gempabumi dan upaya mitigasi.

**6. Apel Siaga Bencana di Tugu Gempa, Korong Lubuak Laweh, Nagari
Tandikat Utara, Kec. VII Koto Patamuan**





Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Apel Siaga Bencana dalam rangka mengenang Gempabumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 di Sumatera Barat, khususnya di daerah Kab. Padang Pariaman. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang akan terjadi. Bupati Padang Pariaman, Bapak Dr. John Kenedy Azis, S.H., M.H. menjadi Pembina di dalam pelaksanaan Apel Siaga Bencana. Kegiatan ini juga mengundang forkopimda, Kepala Badan/Dinas/kantor/Camat/Bagian di Kab. Padang Pariaman, dunia usaha, relawan kebencanaan, media, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kebencanaan dengan total peserta lebih kurang 250 orang. Selain apel siaga bencana, juga dilaksanakan kegiatan tambahan seperti penandatanganan ikrar pemangku kebencanaan, komitmen bersama dalam PB, penaburan bunga di lokasi pemakaman masal, serta penanaman pohon sebagai salah satu upaya mitigasi.

7. Peningkatan Kapasitas Kelompok Siaga Bencana di Nagari Campago Selatan



Pada kegiatan ini disampaikan dua materi, yang pertama terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan yang kedua terkait tumbuhkan budaya siaga bencana bersama kelompok siaga bencana (KSB) nagari. Setelah pemberian materi, dilaksanakan kegiatan tanya jawab dan diskusi antara narasumber dengan peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan diikuti oleh 20 peserta yang merupakan pengurus dan anggota KSB Nagari Campago Selatan.

8. Sosialisasi dan Simulasi Bencana Gempabumi di SMAN 1 V Koto Timur



Kegiatan ini yaitu pengenalan jenis bencana, ancaman bencana yang ada diKec. V Koto Timur, serta upaya mitigasi dari bencana. Setelah pemberian materi dilanjutkan dengan tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Selanjutnya dilaksanakan simulasi bencana gempabumi dan pengenalan jalur evakuasi dan titik kumpul kepada peserta.

9. Sosialisasi Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan



10. Sosialisasi Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami di Nagari Kuranji Hilir



11. Latihan dan Simulasi Evakuasi Mandiri Bencana Gempabumi dan Tsunami di Pusdalops BPBD, Nagari Ulakan, Nagari Tapakih, dan Nagari Katapiang



BPBD Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan latihan dan simulasi evakuasi mandiri Bencana Gempabumi dan Tsunami dalam rangka memperingati hari kesadaran tsunami sedunia (*World Tsunami Awareness Day*). Kegiatan dilaksanakan secara serentak oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota di sepanjang pesisir pantai Pulau Sumatera dan sekitarnya. Kegiatan dimulai jam 09.00 WIB dengan pembukaan acara

oleh BMKG. Selanjutnya, pada pukul 10.00 WIB dalam skenario terjadi gempa dan berbunyi sirine peringatan dini tsunami. Pada latihan ini, terdapat empat peringatan dini dari Peringatan Dini I sampai dengan Peringatan Dini IV, yang selanjutnya dilakukan evaluasi bersama.

12. Sosialisasi Kesiapsiagaan Keluarga Terhadap Berbagai Kondisi Darurat: Keluarga Siaga keluarganya PK di Kantor Camat Lubuk Alung



Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kab. Padang Pariaman, Bapak Mitri Jalsim, S.E. dan didampingi oleh Kasi Pencegahan, Bapak Syaiful Bakri, S.E. menjadi narasumber dalam kegiatan memperkuat kesiapsiagaan keluarga terhadap berbagai kondisi darurat bencana yang diadakan oleh TP PKK Kecamatan Lubuk Alung. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah membangun keluarga tangguh bencana (KATANA) dan dilakukan diskusi bersama antara narasumber dan peserta. Kegiatan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari anggota PKK Kecamatan Lubuk Alung.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target dari sasaran ini terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah:

Berdasarkan indikator renstra 2021 -2026 **Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** terdapat

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang menangani kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, sehingga pelaksanaan kegiatan belum optimal di seluruh wilayah.
2. Kendala waktu dan koordinasi, baik dari sisi pelaksana kegiatan maupun partisipasi masyarakat, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat.

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan program dari pemerintah pusat (BNPB/IDRIP) dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas pencegahan serta mitigasi bencana.
2. Partisipasi aktif masyarakat dan relawan kebencanaan dalam kegiatan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan kesiapsiagaan.
3. Komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor, termasuk OPD terkait, TNI/Polri, serta lembaga pendidikan dalam mendukung program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
4. Pemanfaatan media informasi dan teknologi, yang membantu penyebaran informasi kebencanaan secara lebih luas dan efektif.

Berdasarkan Indikator Renstra 2025-2030 **Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana.**

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang menangani kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, sehingga pelaksanaan kegiatan belum optimal di seluruh wilayah.
2. Kendala waktu dan koordinasi, baik dari sisi pelaksana kegiatan maupun partisipasi masyarakat, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat.

Faktor Pendukung :

1. Adanya dukungan program dari pemerintah pusat (BNPB/IDRIP) dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas pencegahan serta mitigasi bencana.
2. Partisipasi aktif masyarakat dan relawan kebencanaan dalam kegiatan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan kesiapsiagaan.
3. Komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor, termasuk OPD terkait, TNI/Polri, serta lembaga pendidikan dalam mendukung program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
4. Pemanfaatan media informasi dan teknologi, yang membantu penyebaran informasi kebencanaan secara lebih luas dan efektif.

e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tercapainya target indikator sasaran strategis pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan terdapat sebuah indikator sebagai berikut:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Dalam kegiatan ini terdapat satu subkegiatan yang menunjang tercapainya realisasi indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. yaitu

i. Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

1. Pada sub kegiatan dilakukan pemberian informasi kepada masyarakat baik melalui media sosial (Facebook dan Instagram) maupun melalui media cetak seperti Koran, Spanduk, Pamflet, dan Banner.
2. Pada Sub Kegiatan ini dilakukan penyampain informasi melalui tatap muka ketika sosialisasi dilakukan.
3. Di Sub kegiatan ini juga dilakukan pengadaan rambu-rambu informasi kebencanaan yang dipasang di daerah rawan bencana. Adapun daerah yang sudah terpasang rambu-rambu kebencanaan adalah : Nagari Manggopoh Palak Gadang, Nagari Ulakan, Nagari Katapiang, Nagari Kuranji Hilir, Nagari Pilubang dan Nagari Malai V Suku.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiagsiagaan Terhadap Bencana
Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota



1. Pada sub kegiatan ini dilakukan peningkatan kapasitas bagi Masyarakat di daerah rawan bencana. Dimana semua kegiatan ini dilakukan pada Program IDRIP BNPB dengan bantuan World Bank
2. Dalam Peningkatan kapasitas Destana melalui program IDRIP ini dilakukan berbagai kegiatan diantaranya yaitu :
 - **Sosialisasi Dinagari**
Sosialisasi adalah proses memperkenalkan masyarakat pada norma dan adat istiadat social. Proses ini membantu individu berfungsi baik dalam masyarakat.
 - **Pengumpulan Data Penilaian Ketangguhan Desa**
Pengumpulan data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) bertujuan untuk memetakan kondisi dan gambaran awal mengenai tingkat risiko, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas desa dalam menghadapi ancaman tsunami sebagai data dasar (baseline) tingkat ketangguhan bencana desa.
 - **Verifikasi Penilaian Ketangguhan Desa**
Verifikasi penilaian dari data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) suatu nagari yang telah dikumpulkan.
 - **FGD Penilaian Ketangguhan Desa**
 - **Pengenalan Penanggulangan Bencana**
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, forum/lembaga yang sudah didesa/nagari terkait dengan kegiatan destana dan pengenalan mengenai dasar penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
 - **Persiapan Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana**
FPRB desa/kelurahan merupakan suatu wadah atau mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama para pihak dalam

upaya pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan.

Keanggotaan FPRB desa/kelurahan harus memperhatikan partisipasi/keterwakilan dari berbagai organisasi/lembaga di desa/kelurahan meliputi : pemerintah desa/kelurahan, lembaga usaha, organisasi masyarakat, kelompok profesi, kategori-kategori lain, termasuk kelompok difabel, kelompok perempuan dan perwakilan dari wilayah.

- **Penguatan Forum PRB Dan Relawan**
Tim relawan desa/kelurahan merupakan wadah yang menaungi individu-individu yang secara sukarela dan siap sedia melaksanakan pengurangan risiko bencana baik dalam kondisi pra bencana, respon darurat dan pasca bencana.
- **Persiapan Penyusunan Peta Resiko**
Persiapan penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat.
- **Penyusunan Peta Resiko Bencana**
Penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat. Masyarakat diberdayakan agar mampu mengenali potensi ancaman bencana, lokasi titik kumpul, lokasi bangunan strategis, dan tempat evakuasi sementara di desa/kelurahan.
- **Finalisasi Penyusunan Peta Resiko**
Finalisasi penyusunan peta resiko bencana yang telah dilakukan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat selama proses penyusunan peta resiko bencana.
- **Persiapan Rencana Pembentukan Aksi Komunitas Rpb**
Proses persiapan penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana dilakukan secara partisipatif.
- **Pembentukan Rencana Aksi Komunitas**

Proses penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana (RAK-PRB) dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur pentahelix tingkat desa berdasarkan peta risiko bencana yang telah disusun. Dokumen ini berisikan rencana kegiatan – kegiatan prioritas desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya – upaya PRB dalam jangka waktu tertentu.

- **Finalisasi Rencana Aksi Komunitas**

Finalisasi RAK mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa/kelurahan. Agar keberlanjutan RAK PRB dapat terjamin, harus diintegrasikan menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

- **Persiapan Mitigasi Bencana**

Persiapan mitigasi bencana dilakukan dengan mempersiapkan penyusunan SOP peringatan dini berbasis komunitas yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada masyarakat dalam merespon informasi peringatan dini bencana. Keluarga tangguh bencana yang memiliki pengetahuan risiko bencana, pengetahuan keadaan darurat bencana, akses informasi formal kebencanaan, pengetahuan lokasi dan rute jalur evakuasi di rumah dan dilingkungannya. Penyusunan dokumen rencana evakuasi dilaksanakan melalui peran aktif masyarakat untuk memastikan aksesibilitas jalur evakuasi serta dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan anggota masyarakat.

- **Pelaksanaan Mitigasi Bencana**

Kebutuhan mitigasi bencana mengacu pada dokumen rencana aksi komunitas PRB yang telah disusun. Pelaksanaan mitigasi bencana structural didampingi oleh fasilitator sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga

pemeliharaan guna menjaga keberlanjutannya.

ii. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitgasi Bencana Kabupaten/Kota.

1. Pada sub kegiatan ini dilakukannya sosialisasi Pelatihan dan Mitigasi bencana Pemuda Pancasila bersama BPBD Padang Pariaman, Sosialisasi Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Nagari Tapakih, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pramuka dalam Menghadapi Bencana, Peningkatan Sinergitas antar Relaan dalam Penanganan Darurat Bencana dan Sosialisasi Simulasi Bencana Gempa bumi

iii. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota

1. Pada sub kegiatan ini digunakan untuk pemberian informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui media elektronik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 99,01 = 0,99\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 0,99 = 0,99\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **0,99%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	0,99%	0,99%

5. REALISASI KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029



**Sasaran Strategis 2 Renstra 2025–2029:
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2025		%	Inter-pestasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	65%	100 %	100	Berhasil

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 100% dengan kategori Berhasil

b. Perbandingan terget dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 dengan periode sebelumnya

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	119%	65%	100 %	100	Berhasil



Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 119%, capaian tahun 2025 mengalami penurunan secara persentase. Namun demikian, penurunan tersebut tidak menunjukkan menurunnya kinerja, melainkan karena pada tahun 2024 realisasi melampaui target (over achievement), sedangkan pada tahun 2025 capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa seluruh nagari yang menjadi sasaran telah memperoleh layanan kesiapsiagaan bencana sesuai dengan rencana. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembentukan dan pembinaan relawan, penyusunan rencana kontinjensi, simulasi kebencanaan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah nagari dan para pemangku kepentingan.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan kesiapsiagaan melalui pembinaan secara berkelanjutan, pembaruan data risiko bencana, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas program kesiapsiagaan di setiap nagari. Dengan demikian, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dapat terus ditingkatkan meskipun indikator kuantitatif telah mencapai target 100%.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah 2025-2029

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2025 sampai 2029 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	%	100	65	80	90	100	100	65	80	90	100	100	Berhasil

Target jangka menengah indikator **Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana** direncanakan meningkat secara bertahap, yaitu sebesar **65% pada tahun 2025, 80% pada tahun 2026, 90% pada tahun 2027, serta 100% pada tahun 2028 dan 2029**. Berdasarkan realisasi yang diperoleh, capaian pada setiap tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu **65% (2025), 80% (2026), 90% (2027), 100% (2028), dan 100% (2029)**. Dengan demikian, tingkat pencapaian target jangka menengah adalah **100%** dengan interpretasi **Berhasil**.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan bencana telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan, pembentukan serta pembinaan desa/nagari tangguh bencana, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan, penyelenggaraan simulasi kebencanaan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah nagari dan para pemangku kepentingan.

Ke depan, meskipun target telah tercapai hingga **100%**, fokus pelaksanaan program perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesiapsiagaan, penguatan kapasitas kelembagaan, pembaruan dokumen dan data kebencanaan, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, seluruh nagari tidak hanya telah memperoleh layanan kesiapsiagaan bencana, tetapi juga memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana secara berkelanjutan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana pada tahun 2025 berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 65% dengan realisasi 65%, sehingga tingkat capaian mencapai 100% dan termasuk dalam kategori berhasil.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana yang disusun secara terarah sesuai dengan target kinerja.
2. Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik antara BPBD, pemerintah nagari, perangkat daerah terkait, serta unsur TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan secara bertahap pada nagari sasaran.



4. Adanya dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
5. Meningkatnya partisipasi pemerintah nagari dan masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya pada sebagian nagari, perbedaan tingkat kapasitas aparatur dan masyarakat, serta perlunya pembaruan data risiko bencana secara berkala.

Alternatif solusi yang telah dan akan terus dilakukan meliputi:

- meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada nagari yang belum memiliki kapasitas kesiapsiagaan yang optimal;
- memperluas pelaksanaan pelatihan, simulasi, dan edukasi kebencanaan secara berkelanjutan;
- memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyebaran informasi dan sistem peringatan dini; serta
- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar penyempurnaan program dan peningkatan kualitas layanan kesiapsiagaan bencana.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kualitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di seluruh nagari.

Tabel 3.10

Perbandingan antara target dan capaian jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Target Warga Negara yang Berada di Kawasan Bencana Prioritas (Jiwa)	Capaian Warga Negara yang Mendapatkan Layanan (Jiwa)	Persentase (%)
300.832	308.781	100%

Berdasarkan Indikator Renstra 2025-2030 **Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana.**

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang menangani kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, sehingga pelaksanaan kegiatan belum optimal di seluruh wilayah.
2. Kendala waktu dan koordinasi, baik dari sisi pelaksana kegiatan maupun partisipasi masyarakat, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat.

Faktor Pendukung :

1. Adanya dukungan program dari pemerintah pusat (BNPb/IDRIP) dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas pencegahan serta mitigasi bencana.
2. Partisipasi aktif masyarakat dan relawan kebencanaan dalam kegiatan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan kesiapsiagaan.
3. Komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor, termasuk OPD terkait,

TNI/Polri, serta lembaga pendidikan dalam mendukung program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

4. Pemanfaatan media informasi dan teknologi, yang membantu penyebarluasan informasi kebencanaan secara lebih luas dan efektif.

e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tercapainya target indikator sasaran strategis pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Pada sasaran strategis Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sebuah indikator sebagai berikut:

1. Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Dalam kegiatan ini terdapat satu subkegiatan yang menunjang tercapainya realisasi indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. yaitu

i. Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

1. Pada sub kegiatan dilakukan pemebrian infomasi kepada masyarakat baik melalui media sosial (Facebook dan Instagram) maupun melalui media cetak seperti Koran, Spanduk, Pamflet, dan Banner.
2. Pada Sub Kegiatan ini dilakukan penyampain informasi melalui tatap muka ketika sosialisasi dilakukan.

3. Di Sub kegiatan ini juga dilakukan pengadaan rambu-rambu informasi kebencanaan yang dipasang di daerah rawan bencana. Adapun daerah yang sudah terpasang rambu-rambu kebencanaan adalah : Nagari Manggopoh Palak Gadang, Nagari Ulakan, Nagari Katapiang, Nagari Kuranji Hilir, Nagari Pilubang dan Nagari Malai V Suku.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiagsiagaan Terhadap Bencana
Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:
 - i. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 1. Pada sub kegiatan ini dilakukan peningkatan kapasitas bagi Masyarakat di daerah rawan bencana. Dimana semua kegiatan ini dilakukan pada Program IDRIP BNPB dengan bantuan World Bank
 2. Dalam Peningkatan kapasitas Destana melalui program IDRIP ini dilakukan berbagai kegiatan diantaranya yaitu :
 - Sosialisasi Dinagari
Sosialisasi adalah proses memperkenalkan masyarakat pada norma dan adat istiadat social. Proses ini membantu individu berfungsi baik dalam masyarakat.
 - Pengumpulan Data Penilaian Ketangguhan Desa
Pengumpulan data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) bertujuan untuk memetakan kondisi dan gambaran awal mengenai tingkat risiko, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas desa dalam menghadapi ancaman tsunami sebagai data dasar (baseline) tingkat ketangguhan bencana desa.
 - Verifikasi Penilaian Ketangguhan Desa
Verifikasi penilaian dari data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) suatu nagari yang telah dikumpulkan.

- FGD Penilaian Ketangguhan Desa
- Pengenalan Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, forum/lembaga yang sudah didesa/nagari terkait dengan kegiatan destana dan pengenalan mengenai dasar penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
- Persiapan Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana

FPRB desa/kelurahan merupakan suatu wadah atau mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan.

Keanggotaan FPRB desa/kelurahan harus memperhatikan partisipasi/keterwakilan dari berbagai organisasi/lembaga didesa/kelurahan meliputi : pemerintah desa/kelurahan, lembaga usaha, organisasi masyarakat, kelompok profesi, kategori-kategori lain, termasuk kelompok difabel, kelompok perempuan dan perwakilan dari wilayah.
- Penguatan Forum PRB Dan Relawan

Tim relawan desa/kelurahan merupakan wadah yang menaungi individu-individu yang secara sukarela dan siap sedia melaksanakan pengurangan risiko bencana baik dalam kondisi pra bencana, respon darurat dan pasca bencana.
- Persiapan Penyusunan Peta Resiko

Persiapan penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat.
- Penyusunan Peta Resiko Bencana

Penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat. Masyarakat diberdayakan agar mampu mengenali potensi ancaman bencana, lokasi titik kumpul, lokasi bangunan strategis, dan

tempat evakuasi sementara didesa/kelurahan.

- **Finalisasi Penyusunan Peta Resiko**
Finalisasi penyusunan peta resiko bencana yang telah dilakukan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat selama proses penyusunan peta resiko bencana.
- **Persiapan Rencana Pembentukan Aksi Komunitas Rpb**
Proses persiapan penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana dilakukan secara partisipatif.
- **Pembentukan Rencana Aksi Komunitas**
Proses penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana (RAK-PRB) dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur pentahelix tingkat desa berdasarkan peta risiko bencana yang telah disusun. Dokumen ini berisikan rencana kegiatan – kegiatan prioritas desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya – upaya PRB dalam jangka waktu tertentu.
- **Finalisasi Rencana Aksi Komunitas**
Finalisasi RAK mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa/kelurahan. Agar keberlanjutan RAK PRB dapat terjamin, harus diintegrasikan menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).
- **Persiapan Mitigasi Bencana**
Persiapan mitigasi bencana dilakukan dengan mempersiapkan penyusunan SOP peringatan dini berbasis komunitas yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada masyarakat dalam merespon informasi peringatan dini bencana. Keluarga tangguh bencana yang memiliki pengetahuan risiko bencana, pengetahuan keadaan darurat bencana, akses informasi formal kebencanaan, pengetahuan

lokasi dan rute jalur evakuasi di rumah dan dilingkungannya. Penyusunan dokumen rencana evakuasi dilaksanakan melalui peran aktif masyarakat untuk memastikan aksesibilitas jalur evakuasi serta dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan anggota masyarakat.

- **Pelaksanaan Mitigasi Bencana**

Kebutuhan mitigasi bencana mengacu pada dokumen rencana aksi komunitas PRB yang telah disusun. Pelaksanaan mitigasi bencana structural didampingi oleh fasilitator sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan guna menjaga keberlanjutannya.

- ii. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

1. Pada sub kegiatan ini dilakukannya sosialisasi Pelatihan dan Mitigasi bencana Pemuda Pancasila bersama BPBD Padang Pariaman, Sosialisasi Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Nagari Tapakih, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pramuka dalam Menghadapi Bencana, Peningkatan Sinergitas antar Relaan dalam Penanganan Darurat Bencana dan Sosialisasi Simulasi Bencana Gempa bumi

- iii. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota

1. Pada sub kegiatan ini digunakan untuk pemberian informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui media elektronik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal,

tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 99,01 = 0,99\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 0,99 = 0,99\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **0,99%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	100%	0,99%	0,99%

6. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2025



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Tabel 3.11 Perbandingan target dan sasaran th. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100%	Berhasil

Pada tahun berjalan, target indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditetapkan sebesar 87%, sedangkan realisasi mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan interpretasi Berhasil.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh warga yang terdampak bencana dan memerlukan bantuan telah memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan standar operasional penanganan darurat. Realisasi yang melebihi target mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penanganan darurat serta kesiapan sumber daya yang dimiliki dalam merespons setiap kejadian bencana.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kesiapsiagaan personel, berfungsinya Tim Reaksi Cepat (TRC), koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, relawan, dan pemerintah nagari, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasi penyelamatan dan evakuasi. Selain itu, sistem pelaporan kejadian dan komunikasi yang berjalan

dengan baik turut mempercepat proses penanganan terhadap masyarakat terdampak.

Meskipun target telah terlampaui, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemeliharaan dan penambahan peralatan penyelamatan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta evaluasi berkala terhadap setiap pelaksanaan penanganan darurat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun-tahun mendatang.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2024 dan 2025 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100 %	100%	Berhasil

Berdasarkan Tabel di atas tentang Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya, secara umum kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024. Seluruh indikator sasaran strategis berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar **100%**, sehingga masuk dalam kategori **berhasil**.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Pelayanan Penanganan dalam Keadaan Darurat Bencana**, indikator **Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi pada tahun 2024 sebesar **100%**, sedangkan pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai **100%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sehingga seluruh warga terdampak yang menjadi sasaran pelayanan dapat memperoleh layanan sesuai standar pelayanan minimal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	67	72	77	100	87	92	99,9	100	100	100	100	0	Berhasil

Untuk sasaran ketiga dengan indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditargetkan

67% yang mendapatkan layanan tersebut dan pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 92% korban bencana yang mendapatkan layanan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana dilakukan upaya-upaya yang dapat mencapai target pada indikator yang telah ditentukan, adapun indikator pada sasaran strategis ini adalah

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Persentase dari indikator tersebut didapatkan dari hasil pembagian jumlah warga negara korban bencana yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikalikan dengan 100% .

Tabel 3.11 Perbandingan antara target dan capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Target Jumlah Warga Negara Korban Bencana (Jiwa)	Capaian Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Layanan (Jiwa)	Persentase (%)
26.764	36,322	100%

Adapun yang dimasukkan ke dalam korban bencana adalah warga negara yang meninggal, hilang, sakit/luka, menderita/terdampak dan mengungsi akibat dari bencana. Pada tahun 2025 terdapat 36.322 jiwa warga negara yang menjadi korban bencana dari 332 kejadian bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk capaian pada tahun 2025 BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil melakukan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada seluruh korban bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% maka capaiannya sebesar 100%.

Adapun layanan yang BPBD Padang Pariaman dalam mencapai indikator IKU tersebut adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara langsung dan secara tidak langsung. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan secara langsung dilakukan dengan menerjunkan langsung Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD ke lokasi bencana. Adapun contohnya seperti pencarian orang hilang, penyelamatan dan pengevakuasan korban bencana banjir, pembersihan pohon tumbang dan material longsor dan sebagainya. Penyelamatan secara langsung ini dilakukan jika korban bencana tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri.





Gambar 3.5 Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Sedangkan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan cara penyampaian informasi kepada masyarakat yang berada di lokasi bencana untuk dapat melakukan evakuasi secara mandiri ke tempat lebih aman.

Adapun keberhasilan dalam capaian sasaran ini didukung oleh beberapa faktor pendukung seperti :

- a. Adanya dukungan anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- b. Adanya dukungan Instansi terkait BNPB, World Bank, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan P3A, Pemerintah

Nagari dan Lembaga Nagari, TNI, POLRI.

- c. Adanya dukungan dari pihak pemerintahan kecamatan, nagari dan masyarakat yang berada di lokasi kejadian bencana.
- d. Adanya dukungan dari pihak relawan kebencanaan dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Adanya dukungan sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai dalam upaya penanggulangan bencana.
- f. Adanya kemampuan dan kompetensi Tim Reaksi Cepat (TRC), Pusdalops, dan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target dari sasaran ini terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan SDM yang andal dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - b. Seringnya terjadi kerusakan kendaraan operasional lapangan
 - c. Tidak akuratnya informasi dilapangan yang disampaikan masyarakat kepada BPBD Kabupaten Padang Pariaman
 - d. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, seperti masih kurangnya uang kejadian yang tersedia.
 - e. Ketersediaan logistik yang belum sebanding dengan luas wilayah dan potensi bencana
- e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tercapainya target indikator sasaran strategis pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana terdapat sebuah indikator sebagai berikut:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:

a) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Pada sub kegiatan ini dilakukan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kepada korban bencana yang dilakukan oleh tim reaksi cepat (TRC).

2. Kegiatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pada kegiatan ini terdapat sebuah sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini yaitu :

a) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Saran dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

- Pada sub kegiatan ini digunakan untuk pemberian informasi terkait bencana dan rencana evakuasi korban bencana kepada masyarakat korban bencana. Kegiatan ini dilakukan oleh tim Pusdalops BPBD.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana operasional, terutama saat terjadi beberapa kejadian bencana secara bersamaan di lokasi yang berbeda.

2. Sebagian sarana dan prasarana operasional belum dalam kondisi optimal, sehingga memerlukan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala.
3. Masih terbatasnya SDM yang memiliki pelatihan teknis dan sertifikasi kebencanaan lanjutan, khususnya untuk penanganan bencana dengan karakteristik khusus.
4. Banyaknya jenis dan ancaman bencana di Kabupaten Padang Pariaman, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, abrasi pantai, dan potensi tsunami, yang menuntut kesiapan peralatan dan keahlian yang beragam.

Faktor Pendukung:

1. Ketersediaan jumlah SDM yang relatif memadai, sehingga seluruh kejadian bencana dapat ditangani sesuai dengan standar operasional.
2. Adanya SDM yang telah terlatih dan berpengalaman dalam menangani berbagai jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan TNI, Polri, OPD terkait, relawan, dan masyarakat, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
4. Pengalaman daerah dalam menghadapi beragam jenis bencana, yang meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan respon dalam setiap kejadian.

Pada sasaran strategis Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah terdapat sebuah indikator sebagai berikut:

Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani Faktor Penghambat: Adapun Program yang mendukung dan menghambat capaian target indikator tersebut :

Faktor penghambat

1. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana operasional, terutama saat terjadi beberapa kejadian bencana secara bersamaan di lokasi yang berbeda.
2. Sebagian sarana dan prasarana operasional belum dalam kondisi optimal, sehingga memerlukan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala.
3. Masih terbatasnya SDM yang memiliki pelatihan teknis dan sertifikasi kebencanaan lanjutan, khususnya untuk penanganan bencana dengan karakteristik khusus.
4. Banyaknya jenis dan ancaman bencana di Kabupaten Padang Pariaman, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, abrasi pantai, dan potensi tsunami, yang menuntut kesiapan peralatan dan keahlian yang beragam.

Faktor Pendukung:

1. Ketersediaan jumlah SDM yang relatif memadai, sehingga seluruh kejadian bencana dapat ditangani sesuai dengan standar operasional.
2. Adanya SDM yang telah terlatih dan berpengalaman dalam menangani berbagai jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan TNI, Polri, OPD terkait, relawan, dan masyarakat, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
4. Pengalaman daerah dalam menghadapi beragam jenis bencana, yang meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan respon dalam setiap kejadian.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 99,94 = 0,06\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 0,06 = 0,06\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada

sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **0,06%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	0,06%	0,06%

III. REALISASI KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029



Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Tabel Capaian Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2025		%	Inter-pestasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8
	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100 %	100%	Berhasil

Pada tahun 2025, target indikator Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan interpretasi Berhasil

b. Perbandingan target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.13

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	100 %	100%	Berhasil

Pada tahun 2025, target indikator Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan interpretasi Berhasil. Capaian ini juga sama dengan realisasi tahun 2024 yang telah mencapai 100%, sehingga menunjukkan bahwa kinerja penanganan darurat bencana dapat dipertahankan secara konsisten.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa seluruh kejadian bencana yang terjadi di wilayah kerja telah mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang berlaku. Penanganan meliputi kegiatan kaji cepat, respons darurat, evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, koordinasi lintas sektor, serta dukungan logistik sesuai dengan tingkat kedaruratan yang dihadapi.

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh kesiapsiagaan personel, keberadaan Tim Reaksi Cepat (TRC), koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, pemerintah nagari, relawan, serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai. Selain itu, sistem pelaporan kejadian yang berjalan dengan baik memungkinkan respons dilakukan secara cepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.

Meskipun target telah tercapai secara penuh, peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi petugas, pemeliharaan dan pengadaan peralatan penanggulangan bencana, penguatan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan, serta evaluasi berkala terhadap setiap kejadian



bencana. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian 100% sekaligus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas penanganan darurat bencana di masa mendatang.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2025 sampai 2029 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Berhasil

Target jangka menengah untuk indikator **Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani** ditetapkan sebesar **100%** pada setiap tahun selama periode **2025–2029**. Berdasarkan realisasi yang dicapai, seluruh kejadian bencana pada setiap tahun berhasil ditangani sehingga realisasi juga mencapai **100%** setiap tahunnya. Dengan demikian, tingkat pencapaian target jangka menengah adalah **100%** dengan interpretasi **Berhasil**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah melalui BPBD mampu mempertahankan kinerja penanganan darurat bencana secara konsisten. Seluruh kejadian bencana yang terjadi memperoleh penanganan sesuai dengan prosedur operasional, mulai dari penerimaan informasi kejadian, kaji cepat, mobilisasi personel dan peralatan, penyelamatan serta evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga koordinasi penanganan darurat dengan instansi terkait.

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh kesiapan personel dan Tim Reaksi Cepat (TRC), ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, sistem komunikasi dan pelaporan yang berjalan dengan baik, serta sinergi yang kuat antara BPBD, TNI, Polri, pemerintah nagari, perangkat daerah

terkait, relawan, dan masyarakat dalam setiap penanganan kejadian bencana.

Meskipun target telah tercapai secara konsisten, peningkatan kualitas penanganan darurat tetap perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi kebencanaan, meningkatkan kesiapan logistik dan peralatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap kejadian bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja sekaligus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah secara berkelanjutan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana dilakukan upaya-upaya yang dapat mencapai target pada indikator yang telah ditentukan, adapun indikator pada sasaran strategis ini adalah

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Persentase dari indikator tersebut didapatkan dari hasil pembagian jumlah warga negara korban bencana yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikalikan dengan 100% .

Tabel 3.14

Perbandingan antara target dan capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Target Jumlah Warga Negara Korban Bencana (Jiwa)	Capaian kejadian bencana yang dapat ditangani (Jiwa)	Persentase (%)
26.764	36,322	100%

Adapun yang dimasukkan ke dalam korban bencana adalah warga negara yang meninggal, hilang, sakit/luka, menderita/terdampak dan mengungsi akibat dari bencana. Pada tahun 2025 terdapat 36.322 jiwa warga negara yang menjadi korban bencana dari 332 kejadian bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk capaian pada tahun 2025 BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil melakukan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada seluruh korban bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% maka capaiannya sebesar 100%.

Adapun layanan yang BPBD Padang Pariaman dalam mencapai indikator IKU tersebut adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara langsung dan secara tidak langsung. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan secara langsung dilakukan dengan menerjunkan langsung Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD ke lokasi bencana. Adapun contohnya seperti pencarian orang hilang, penyelamatan dan pengevakuasian korban bencana banjir, pembersihan pohon tumbang dan material longsor dan sebagainya. Penyelamatan secara langsung ini dilakukan jika korban bencana tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri.

e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sebesar 100% didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana serta berjalan secara efektif. Program yang berkontribusi utama adalah Program Penanggulangan Bencana, khususnya

kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Penanganan Darurat Bencana.

Beberapa kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tersebut meliputi:

- pelaksanaan kaji cepat terhadap lokasi kejadian bencana;
- pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan personel BPBD untuk penanganan darurat;
- penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- penyediaan dan pendistribusian logistik serta peralatan penanggulangan bencana;
- koordinasi dengan TNI, Polri, perangkat daerah, pemerintah nagari, relawan, dan instansi terkait dalam penanganan darurat;
- pemantauan kondisi wilayah rawan bencana serta penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Program dan kegiatan tersebut mampu mendukung pencapaian target karena dilaksanakan secara tepat waktu, didukung oleh koordinasi lintas sektor yang baik, serta didukung oleh ketersediaan personel, peralatan, dan anggaran sesuai kebutuhan penanganan darurat. Sinergi antarinstansi juga mempercepat proses respons sehingga seluruh kejadian bencana dapat ditangani sesuai standar operasional.

Meskipun tidak terdapat kegagalan dalam pencapaian indikator, peningkatan kualitas program dan kegiatan tetap diperlukan. Perbaikan diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, penguatan sistem komunikasi dan peringatan dini, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan penanganan darurat. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana pada tahun-tahun mendatang.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang

maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 99,94 = 0,06\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 0,06 = 0,06\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **0,06%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	0,06%	0,06%

5. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2025

	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas
---	---

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Tabel 3.15 Perbandingan target dan sasaran th. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Persen	100	100	100%	Berhasil

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan. Kedua indikator memperoleh realisasi sebesar **100%** dengan capaian kinerja **100%**, sehingga termasuk dalam kategori **Berhasil**.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara kualitas dan kuantitas**, indikator **Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana** memiliki target sebesar **85%**, sedangkan realisasinya mencapai **100%**. Dengan demikian, target yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah berjalan secara optimal sehingga seluruh perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang menjadi sasaran penanganan dapat memperoleh layanan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebutuhan. Atas capaian tersebut, indikator ini memperoleh nilai capaian kinerja **100%** dengan interpretasi **Berhasil**.

Selanjutnya,

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2024 dan 2025 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan	Persentase jumlah perumahan,	100%	100%	100 %	100%	Berhasil



	rekonstruksi pascabencana secara kualitas dan kuantitas	permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana					
--	---	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel diatas perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Padang Pariaman mampu mempertahankan kinerja yang optimal dalam pencapaian sasaran strategis bidang rehabilitasi, rekonstruksi, dan penanggulangan pascabencana. Seluruh indikator sasaran strategis memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan interpretasi Berhasil.

Pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara kualitas dan kuantitas, indikator Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana menunjukkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 85%, namun realisasi kembali mencapai 100%. Dengan demikian, meskipun target tahun 2025 lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, BPBD tetap mampu mempertahankan realisasi maksimal sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat dan wilayah terdampak bencana.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas	Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	%	-	65	70	75	80	100	90	-	-	66,66	100	100	0	Berhasil

Pada indikator sasaran strategis keempat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70%, dan pada akhir periode RPJMD tahun 2026 ditargetkan sebesar 90%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk,

mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran strategis ini memiliki indicator **Persentase sektor perumahan dan permukiman,**

infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.

Pada tahun 2024 BPBD Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan dana siap pakai (DSP) dari BNPB dalam upaya rekonstruksi tiga jenis infrastuktur di tiga tempt yang rusak akibat bencana d. Adapun tiga jenis infrastruktur tersebut yang dilakukan rekonstruksi adalah:

1. Jembatan Pinang di kecamatan nan sabaris



2. Jembatan Kubaan



3. Jembatan Batang sani



Dari ketiga objek infrastruktur tersebut kemudian dijadikan sebagai target dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana pada tahun 2024-2025. Dua dari tiga objek tersebut telah dapat diselesaikan pada tahun 2025 dengan persentase terselesainya sebesar 100%, yaitu pada

Adapun faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi tersebut adalah:

1. Lengkapya persyaratan administrasi dan dokumen yang disiapkan oleh kontraktor pelaksana rekonstruksi. Sehingga dapat memperlancar proses pencairan dana sesuai persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam bentuk MC (*monthly certificate*) dan dapat diproses dengan cepat.
2. Pengawasan teknis berjalan cukup baik antara kontraktor dan pengawas

Tabel 3.15. Perbandingan Anatra Target dan Realisasi Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana pada sektor infrastruktur.

Target sektor infratsuktur yang mendapatkan penanganan rekonstruksi pascabencana Tahun 2024-2025	Capaian sektor infratsuktur yang mendapatkan penanganan rekonstruksi pascabencana Tahun 2024-2025	Persentase
1 Objek Infrastruktur	1 Objek Infrastruktur	100%

Dengan penjelasan tersebut didapatkan nilai sektor infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak satu jenis infstuktur dari target satu jenis infrastruktur yang harus diselesaikan pada tahun 2025 sehingga didapatkan nilai persentase sebesar 100% yang kemudian dijadikan nilai capaian dari indikator sasaran ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target dari sasaran ini terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kegitan ini diantaranya adalah:

- Tidak lengkapnya berkas-berkas administrasi untuk kegiatan hibah
- Masih kurangnya uang operasional untuk menjalankan kegiatan monitoring ke pekerjaan hibah, dimana dana operasional tidak sesuai dengan kegiatan yang harus dilakukan ke lapangan. Misalkan minimal dalam seminggu seharusnya dilakukan pengawasan ke lapangan sebanyak tiga atau dua kali monitoring evaluasi dan satu kali rapat mingguan, namun harus dikurangi karena keterbatasan anggaran
- Target output tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran karena ketidakcukupan anggaran 2024

e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas sebuah indikator sebagai berikut:

1. Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.

Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:

- a) Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Pada sub kegiatan ini dilakukan kegiatan rekonstruksi tiga jenis objek infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana yang anggarannya merupakan hibah dari BNPB.
 - Pada sub kegiatan ini juga dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya yaitu:
 - **Screening** atau penyaringan terhadap sektor yang terdampak bencana.
 - **Identifikasi kerusakan**, merupakan lanjutan dari kegiatan screening sebelumnya.
 - **Vervikasi lapangan**, merupakan pengecekan langsung dampak bencana di lokasi bencana.
 - **Koordinasi**, setelah didapatkan data dan hasil dari proses sebelumnya selanjutnya BPBD melakukan koordinasi terkait dampak bencana kepada beberapa OPD pengmpu

terkait, seperti: Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan BPBD, Dinas sosial, dll. Terkait tindak lanjut terhadap dampak bencana tersebut. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD Provinsi dan BNPB Pusat.

- Selain itu apabila permasalahan dampak bencana tidak mampu diselesaikan menggunakan APBD yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya akan melakukan penyusunan proposal untuk permohonan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada BNPB dengan melalui proses Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dari 5 sektor terdampak yaitu: Sektor Perumahan Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi Produktif, Sosial, dan Lintas Sektor

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara

Kualitas dan Kuantitas didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 97,98 = 2,02\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 2,02 = 2,02\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **2,02 %**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	100%	74,75	25,25%

II Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029



Sasaran Strategis 4:
Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana

a. Perbandingan target dan capaian tahun 2025

Tabel 3.17

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan mutu penanggulanga n pascabencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	Persen	100	100	100%	Berhasil

Pada sasaran strategis **Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana**, indikator **Persentase penanggulangan pascabencana** memiliki target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penanggulangan pascabencana yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pemulihan pascabencana, baik melalui rehabilitasi, rekonstruksi, maupun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, indikator ini memperoleh capaian kinerja **100%** dengan interpretasi **Berhasil**.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Padang Pariaman mampu melaksanakan program rehabilitasi, rekonstruksi, dan penanggulangan pascabencana secara efektif. Capaian ini menggambarkan bahwa upaya pemulihan pascabencana telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, didukung oleh koordinasi yang baik, pemanfaatan sumber daya

yang optimal, serta komitmen dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak bencana.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	100%	100%	100 %	100%	Berhasil

Pada sasaran strategis Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana, indikator Persentase penanggulangan pascabencana juga menunjukkan kinerja yang konsisten. Realisasi tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penanggulangan pascabencana dapat dilaksanakan secara efektif sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga mutu pelayanan pemulihan pascabencana tetap terjaga.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak terjadi penurunan realisasi pada kedua indikator sasaran strategis. BPBD Kabupaten Padang Pariaman berhasil mempertahankan tingkat realisasi sebesar 100% pada kedua tahun tersebut, yang mencerminkan konsistensi pelaksanaan program rehabilitasi, rekonstruksi, dan penanggulangan pascabencana. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen organisasi dalam mempercepat pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak bencana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.14. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian
Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Berhasil

Target jangka menengah indikator Persentase penanggulangan pascabencana ditetapkan sebesar 100% pada setiap tahun. Berdasarkan realisasi yang dicapai selama periode pelaksanaan, indikator ini juga terealisasi 100% setiap tahun, sehingga tingkat pencapaian target jangka menengah mencapai 100% dengan interpretasi Berhasil.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penanggulangan pascabencana dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan pascabencana meliputi pelaksanaan kaji kebutuhan pascabencana, koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, fasilitasi pemulihan sarana dan prasarana, pemulihan pelayanan publik, serta dukungan terhadap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan.

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh koordinasi yang baik antara BPBD, perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, tersedianya dokumen kaji kebutuhan pascabencana, dukungan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi faktor penting dalam memastikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.

Meskipun target telah tercapai secara konsisten, peningkatan kualitas penanggulangan pascabencana tetap perlu dilakukan. Upaya yang dapat terus dikembangkan meliputi penyempurnaan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis risiko bencana, peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen pascabencana, penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, mutu penanggulangan pascabencana tidak hanya dipertahankan dari sisi kuantitas capaian, tetapi juga terus meningkat dari aspek kualitas, ketepatan waktu, dan keberlanjutan hasil pemulihan.

d. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada sasaran Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana Secara Kualitas dan Kuantitas sebuah indikator sebagai berikut:

Persentase penanggulangan pasca bencana Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

a. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:

a) Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Pada sub kegiatan ini dilakukan kegiatan rekonstruksi tiga jenis objek infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana yang anggarannya merupakan hibah dari BNPB.

- Pada sub kegiatan ini juga dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya yaitu:
 - **Screening** atau penyaringan terhadap sektor yang terdampak bencana.
 - **Identifikasi kerusakan**, merupakan lanjutan dari kegiatan screening sebelumnya.
 - **Verifikasi lapangan**, merupakan pengecekan langsung dampak bencana di lokasi bencana.
 - **Koordinasi**, setelah didapatkan data dan hasil dari proses sebelumnya selanjutnya BPBD melakukan koordinasi terkait dampak bencana kepada beberapa OPD pengmpu terkait, seperti: Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan BPKD, Dinas social, dll. Terkait tindak lanjut terhadap dampak bencana tersebut. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD Provinsi dan BNPB Pusat.
 - Selain itu apabila permasalahan dampak bencana tidak mampu diselesaikan menggunakan APBD yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya akan melakukan penyusunan proposal untuk permohonan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada BNPB dengan melalui proses Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dari 5 sektor terdampak yaitu: Sektor Perumahan Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi Produktif, Sosial, dan Lintas Sektor

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang

maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\textbf{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\textbf{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 97,98 = 2,02\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\textbf{Total Efisiensi} = 0 + 2,02 = 2,02\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar **2,02 %**



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025*

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	100%	74,75	25,25%

2. Inovasi di BPBD Kabupaten Padang Pariaman

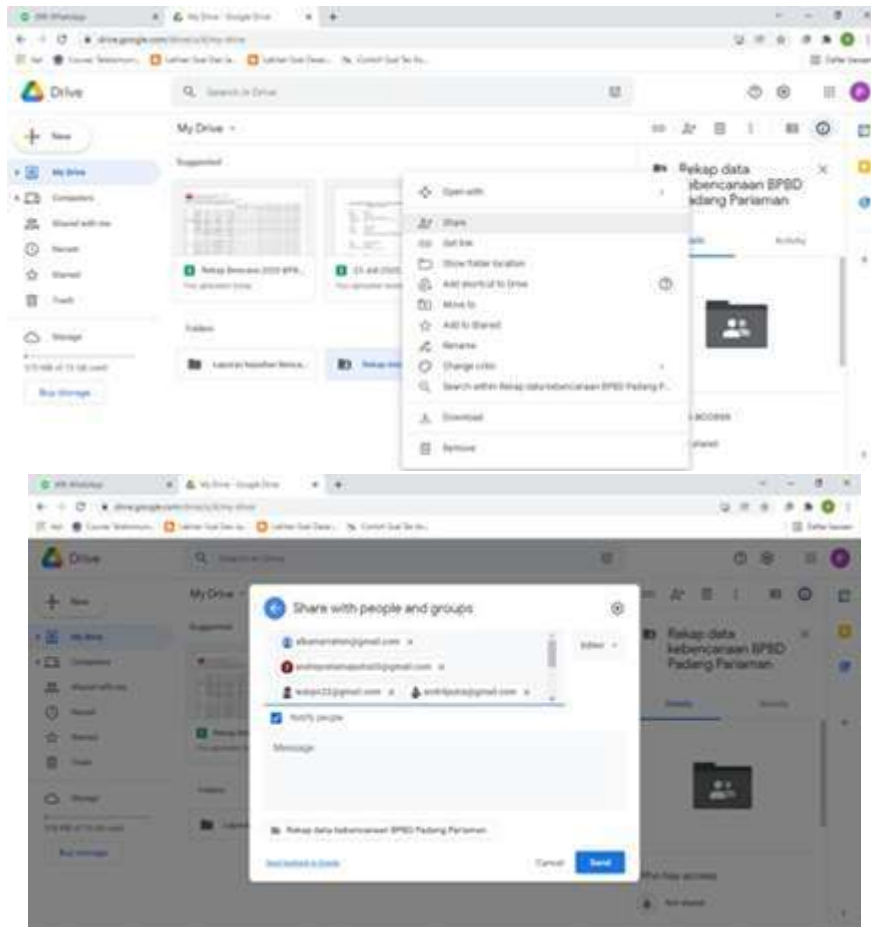
Pada tahun 2025 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki 16 buah inovasi sebagai berikut:

a) PRINSIPAL R-3P



Prinsipal R3P (Prinsipal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) merupakan suatu rangkaian kegiatan prosedur untuk mencapai tujuan oleh BPBD Kab. Padang Pariaman kepada lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat nagari, kecamatan, maupun kabupaten. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dan non pemerintah dalam menentukan skala prioritas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

b) SIaRKAPP (Sistem Informasi Rekap Kebencanaan Padang Pariaman)



DANA PAPA (Digitalisasi Data Kebencanaan Padang Pariaman) yaitu sebuah digitalisasi data rekapan kebencanaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang mana data-data kebencanaan tersebut dicadangkan melalui *cloud storage* agar data lebih aman. *Cloud storage* adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Dengan melakukan pencadangan data ke *cloud storage*, kedepannya diharapkan data-data kebencanaan yang ada di Pusdalops-PB BPBD Padang Pariaman menjadi lebih aman dan lebih mudah diakses.

c) **GERUDUK SANA (Gerakan Untuk Edukasi Mitigasi Bencana)**

Program **GERUDUK SANA** ini merupakan sebuah program sosialisasi berupa edukasi kebencanaan kepada peserta didik terutama kepada siswa yang merupakan dalam penanganan bencana. Tanpanya dilakukan sosialisasi dan pelatihan siswa

tidak akan paham tentang evakuasi mandiri dan akan bertambahnya banyaknya korban dalam evakuasi bencana

Dalam penerapan kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

1. Perencanaan

Melakukan perencanaan atau kegiatan apasaja yang akan dilakukan sebelum dilakukannya koordinasi kepada sekolah yang bersangkutan

2. Koordinasi

Melakukan koordinasi kepada sekolah untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan untuk siswa/i

3. Pelaksanaan

Melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan agar masyarakat memiliki pemahaman perihal bencana dan memiliki kemampuan untuk penanggulangan bencana yang ada seperti evaluasi mandiri

4. Evaluasi

d) Digitalisasi Dokumen Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (DIGIT KUBAH R2PB)



Digitalisasi Dokumen Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (DIGIT KUBAH R2PB) merupakan sebuah implimentasi dan pemanfaatan situs penyimpanan digital yang mana ini sangat berguna agar dokumen-dokumen penting yang ada dapat tersimpan dengan teratur dan rapi. Dan jika seandainya dibutuhkan, bisa di cari kembali tanpa perlu bersusah payah membongkar tempat penyimpanan dokumen fisik.

e) **LOGIS BANA (Layanan Sosial Psikologis Pasca Bencana)**

Sosialisasi Inovasi LOGIS BANA



Layanan Sosial Psikologis Pasca Bencana (LOGIS BANA) merupakan layanan yang bertujuan untuk mengembalikan individu atau keluarga atau kelompok pasca bencana sehingga menjadi kuat secara individu atau kolektif, berfungsi optimal, memiliki ketangguhan dalam menghadapi masalah, serta menjadi berdaya dan produktif dalam menjalani hidupnya.

f) **KATAN BANA**



Program **KATAN BANA (Keluarga Tangguh Bencana)** pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program **KATAN BANA** ini merupakan sebuah program sosialisasi berupa edukasi kebencanaan kepada masyarakat terutama kepada

keluarga yang merupakan dalam penanganan bencana.

3. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 adalah Rp. 6.236.143.087,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Belanja Operasi sebesar Rp. 6.083.243.087,00 dan Belanja modal Rp. 152.900.000,00 . Realisasi anggaran tahun 2025 adalah Rp. 6.150.425.539,00 atau 98,63 %. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	BELANA OPERASI	Rp. 6.083.243.087,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 152.900.000,00

a. Belanja Operasi

Realisasi anggaran belanja operasi terdiri atas gaji dan tunjangan dan kegiatan operasional BPBD yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak Rp. 6.083.243.087,00

b. Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp. 152.900.000,00

Adapun Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.47. Realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.236.143.087,00	6.150.425.539,00	98,63
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.512.891.187,00	5.433.351.369,00	98,56
1	<i>Perencanaan, Peangaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>	<i>40.662.000,00</i>	<i>40.250.731,00</i>	<i>98,56</i>
	<i>Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>19.800.000,00</i>	<i>19.459.000,00</i>	<i>98,99</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>20.862.000,00</i>	<i>20.791.731,00</i>	<i>98,28</i>
2	Administrasi Keuangan Daerah	4.340.154.417,00	4.303.269.384,00	99,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.254.574.417,00	4.217.839.384,00	99,14
	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.580.000,00	85.430.000,00	99,82
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.000.000,00	65.950.650,00	99,93
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	66.000.000,00	65.950.650,00	99,93
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.675.900,00	350.197.290,00	99,30
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>11.466.000,00</i>	<i>11.461.000,00</i>	<i>99,96</i>
	<i>Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>15.991.000,00</i>	<i>15.951.000,00</i>	<i>99,75</i>
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>55,71</i>
	<i>Fasilitas Kinjungan Tamu</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.971.000,00</i>	<i>99,42</i>
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>313.818.900,00</i>	<i>312.964.290,00</i>	<i>99,73</i>
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.715.870,00	632.000.314,00	94,09
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.435.650,00	43.263.000,00	99,60
	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	64.500.000,00	49.462.470,00	76,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.083.100,00	23.960.000,00	99,49



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.697.120,00	515.314.844,00	95.48
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.683.000,00	41.683.000,00	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.700.000,00	37.700.000,00	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.983.000,00	3.983.000,00	100
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	723.251.900,00	717.074.170,00	99.15
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Per jenis Bencana)	0	0	0
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	224.710.500,00	222.474.770,00	99.01
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota	2.520.000,00	2.500.000,00	99.21
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	22.090.100,00	21.880.000,00	99.05
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kota	200.100.400,00	198.094.770,00	99.00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	312.541.400,00	312.355.400,00	99.94
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	299.640.000,00	299.495.400,00	99.95
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	12.901.400,00	12.860.000,00	99.68
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	186.000.000,00	182.244.000,00	97.98
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	186.000.000,00	182.244.000,00	97.98

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Visi pembangunan daerah “*Padang Pariaman Berjaya*” yang kemudian dilanjutkan dengan “*Padang Pariaman Maju dan Sejahtera*” menjadi landasan utama bagi BPBD dalam menyusun strategi dan program kerja. Dalam konteks tersebut, BPBD berfokus pada dua hal penting: memperkuat birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan kebencanaan.

Kabupaten Padang Pariaman yang berada di zona rawan bencana menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim serta keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPBD menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang ambisius, seperti pencapaian nilai SAKIP kategori A dan target layanan kebencanaan hingga 100 persen, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Rencana Kinerja Tahunan 2025 menunjukkan kesinambungan arah kebijakan dari Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029. Fokus utama tetap pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperluas perhatian pada penurunan risiko bencana dan peningkatan efektivitas penanganan darurat. Strategi yang ditempuh mencakup edukasi dan pelatihan masyarakat, simulasi kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta pembangunan mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpadu.



Secara keseluruhan, laporan ini menegaskan bahwa BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan target kinerja yang jelas dan strategi yang terarah, BPBD berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang siaga, tanggap, dan tangguh menghadapi bencana, sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang maju dan sejahtera.

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan anggaran yang terbatas.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta satuan tugas yang ada di BPBD, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang tangguh, tanggap dan tangkas juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan informasi kebencanaan melalui penambahan media informasi bencana
- 2) Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin untuk merealisasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Padang Pariaman, masyarakat Padang Pariaman maupun kepada stakeholders yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Limpato, 02 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



EMRI NURMAN, S.STP., MM
NIP. 19790601 199810 1 001

LAMPIRAN

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EL ABDES MARSYAM,ST,MM.
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Limpato, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUHATRI BUR

Pihak Pertama,



EL ABDES MARSYAM,ST,MM
NIP. 19701219 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	A
2	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
4	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100%

Program

Anggaran

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Rp. 5.544.181.255,00 |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | Rp. 518.070.900,00 |

Limpato, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SUHATRI BUR


EL ABDES MALSYAM, ST, MM
NIP. 19701219 199803 1 004

KETERANGAN					
Ketua Tim		Ditela		Wakil	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
20/6/25		20/6/25	A	20/6/25	Y

Paraf Verifikasi	
Ka. Badan Penunjang	
Inspektur	
Kabag. Organisasi	

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMRI NURMAN, S.STP, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Limpato, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,



EMRI NURMAN, S.STP, MM
NIP. 19790601 199801 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,01
2	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	65%
3	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%
4	Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	100%

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

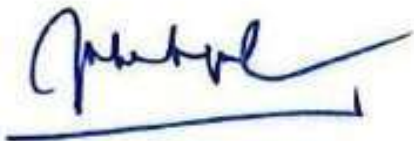
Rp. 5.749.968.155,00
2. Program Penanggulangan Bencana

Rp. 678,992,300,00

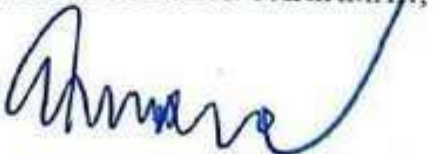
Limpato, 23 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



EMRI NURMAN, S.S., M.M. **Sistem Verifikasi**
NIP. 19790601-199810-1-001

Ka. Bapelutbangda	24
Inspektur	4
Kabag Organisasi	1



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOMPLEK TK/SD MODEL BERTARAF INTERNASIONAL LIMPATO
KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK TLP (0751) 681216 FAX (0751) 681216

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH NOMOR : 09/KEP/BPBD/IX-2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 121 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);

122

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

21. Peraturan Daerah...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman

MEMUTUSKAN :

menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

KEDUA Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah.

KETIGA Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025-2029 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening kegiatan 1.05.1.05.03.01.01.06.

KELIMA Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku tanggal

Ditetapkan di Limpatu pada tanggal:
29 September 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



EMIR NURMAN S.STP., MM
NIP. 6906011998101-001

Tembusan disampaikan kpd yth :

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Arsip.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 09/KEP/BPBD/IX-2025

TANGGAL : 29 September 2025

**TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan tingkat keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan KemenPAN-RB.	BPBD
2	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Presentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	Persentase	Perbandingan jumlah nagari yang telah mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana (sosialisasi, pelatihan, simulasi, pembentukan relawan, dan sistem peringatan dini) terhadap total nagari yang ada di wilayah kabupaten.	
3	Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani		Perbandingan jumlah kejadian bencana yang berhasil ditangani secara cepat dan tepat (evakuasi, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar) sesuai standar operasional prosedur terhadap total kejadian bencana yang terjadi.	
	Meningkatkan mutu	Persentase penanggulangan pasca bencana		Perbandingan jumlah kegiatan rehabilitasi	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2025

4	penanggulangan pasca bencana			dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana sesuai rencana (perbaikan infrastruktur, pemulihan sosial ekonomi, dan lingkungan) terhadap total kebutuhan penanganan pasca bencana.	
---	------------------------------	--	--	--	--

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



EMRI NUSMAN, STP., MM
NIP. 19790601 199810 1

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025**

IKU DAN IKD BPBD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD -2025	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80.01	80.05	81	81.5	82	82.5
2	Presentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	%	65	80	90	100	100	100
3	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani		100	100	100	100	100	100
4	Persentase penanggulangan pasca bencana		100	100	100	100	100	100

5. SURAT PERNYATAAN REVIU TAHUN 2025 INSPEKTORAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LAPORAN HASIL EVALUASI

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**

NOMOR : 68/LHE/INSP/2025
TANGGAL : 21 JULI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
INSPEKTORAT
Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang Kode Pos 25584
Pos El. inspektorat@padangpariamankab.go.id

Nomor : 68 /LHE/INSP/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Penilaian Kinerja Organisasi
(PKO) pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025

Parit Malintang, 21 Juli 2025

**Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Padang Pariaman di
Tempat**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dan Penetapan Pedoman Evaluasi Internal Kabupaten Padang Pariaman No. 43 tahun 2023.

A. Evaluasi Implementasi SAKIP

Evaluasi Implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	- 100	Sangat Memuaskan
2.	A	-90	Memuaskan
3.	BB	-80	Sangat Baik
4.	B	-70	Baik
5.	CC	-60	Cukup
6.	C	- 50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 80,10 dengan kategori A dan interpretasi nilai MEMUASKAN, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KOMPONEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	25,50	30	25,50
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	23,10	30	23,70
3.	PELAPORAN KINERJA	15	12,75	15	11,25
4.	EVALUASI INTERNAL	10	18,75	25	19,75
JUMLAH		100		100	
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			80,10		80,20
PREDIKAT			MEMUASKAN		MEMUASKAN

Evaluasi Implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

B. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

1 . Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan Oleh Inspektorat yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Penentuan predikat PKO Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai. Setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas

capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut.

NILAI KINERJA ORGANISASI NKO		PREDIKAT PKO
1.	$x > 100\%$	Istimewa
2.	$80\% < x \leq 100\%$	Baik
NILAI KINERJA ORGANISASI NKO		PREDIKAT PKO
3.	$60\% < x$	Butuh Perbaikan
4.	$20\% < x \leq 60\%$	Kurang
5.	$0\% < x \leq 20\%$	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105% dengan predikat ISTIMEWA, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	NILAI AKHIR CAPAIAN PENILAIAN KINERJA (PK)
TOTAL CAPAIAN PK	420%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) ATAU RATA RATA CAPAIAN PK	105%
PREDIKAT PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PKO	ISTIMEWA

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Penilaian Kinerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR,
HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19811226 199901 1 001

Tembusan :

1. Bupati Padang Pariaman
2. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Evaluator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

- 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Internal Kabupaten Padang Pariaman
7. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 311KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dan;
8. Surat Keputusan Inspektur Padang Pariaman tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 7001115//Insp-SPNI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kab. Padang Pariaman tahun 2025.

B. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus- menerus (continues improvement). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi Implementasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan Implementasi SAKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil)

Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi •

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggunakan metodologi sebagai berikut •

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara;
3. Konfirmasi.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Urusan Ketertiban dan Keamanan terkait dengan Penggulangan Bencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja. Dari hasil penilaian tahun sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan nilai sebesar 80, 10 termasuk ke dalam kategori A, yang diinterpretasikan sebagai Memuaskan dalam pengelolaan kinerjanya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Selama tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menindaklanjuti beberapa hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas OPD Tahun 2024 yaitu .

1. Pedoman penyusunan kinerja telah dibuat oleh BPBD dalam bentuk SOP penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan SOP penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2. Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan rencana aksi mencakup penyelarasan dalam menjabarkan aksi untuk mencapai target kinerja.
3. Telah dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang disusun agar dapat dicapai, menantang dan realistic Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Untuk saat ini jabatan fungsional belum terdapat pada BPBD. Namun apabila nanti terdapat jabatan fungsional di BPBD maka akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari jabatan tersebut
5. Aktivitas penyempurnaan telah dilakukan sesuai rencana aksi
6. Setiap Pegawai telah memahami terhadap Capaian Kinerja karena setiap pegawai telah diberikan Perjanjian Kinerja setiap awal tahun dan telah mengetahui target kinerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai agar bisa melakukan pemenuhan dokumen dalam pembuatan SKP tahun 2024
7. SOP dalam pengukuran Kinerja BPBD telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi di BPBD
8. Penyempurnaan SOP Pengumpulan Dana Kinerja telah dibuat
9. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang secara berkala dengan Laporan harian dan SKP. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar reward dan punishment dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap pegawai.
10. Informasi telah disajikan dan digunakan dalam pembuatan tabel E81 dan laporan Realisasi dan Fisik Kegiatan (LRFK) dan juga telah dilengkapi dengan faktor penghambat dan faktor pendukung untuk setiap Sub kegiatan yang ada di BPBD
11. Setiap Bidang telah melakukan Akuntabilitas Kinerja dengan mengadakan Rapat Evaluasi Internal yang rutin dilaksanakan setiap bulan (Rapat Evaluasi dimulai dari jenjang THL, Anggota TRC, staf, Eselon IV, Kabid, Sekretaris dan Kalaksa BPBD)
12. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja telah diberdayakan SDM yang memadai dan dokumen LAKIP telah diperbaiki
13. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang secara berkala dengan Laporan harian dan SKP. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar reward dan punishment dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap pegawai.
14. Informasi telah disajikan dan digunakan dalam pembuatan tabel E81 dan laporan Realisasi dan Fisik Kegiatan (LRFK) dan juga telah dilengkapi dengan faktor penghambat dan faktor pendukung untuk setiap Sub kegiatan yang ada di BPBD
15. Setiap Bidang telah melakukan Akuntabilitas Kinerja dengan mengadakan Rapat Evaluasi Internal yang rutin dilaksanakan setiap bulan (Rapat Evaluasi dimulai dari jenjang THL, Anggota TRC, staf, Eselon IV, Kabid, Sekretaris dan Kalaksa BPBD)
16. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja telah diberdayakan SDM yang memadai dan dokumen LAKIP telah diperbaiki

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi a. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025**

Nilai evaluasi Implementasi SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai	%Capaian
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.50	85.00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja badan lain crosscutting	9.00	8.10	90.00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil dan berkesinambungan	15.00	12.00	80.00
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	23.70	79.00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berkelanjutan	9.00	6.30	70,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80,00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.25	75.00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ peningkatan	4.50	4.05	90,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	4.50	60,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	16.75	67,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90,00

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya an memadai	7.5	5.25	70,00
	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kine •a	12.5	10.00	80,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,20	

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel di atas masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain •

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 25,50 dari bobot nilai 30,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Perencanaan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut .

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Pemenuhan perencanaan kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 5,40 dari bobot nilai 6,00, yang ditandai dengan:

- 1) Pedoman Perencanaan yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berupa SOP Penyusunan Renstra dan SOP Penyusunan Renja
- 2) Telah ada dokumen perencanaan RPJMD 2021 — 2026
- 3) Telah ada dokumen perencanaan RENSTRA 2021-2026.
- 4) Telah ada dokumen perencanaan RENJA tahun 2023 dan RENJA tahun 2024.
- 5) Telah ada dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi tahun 2023 dan Rencana Aksi tahun 2024.
- 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu DPA dan RKA tahun 2023 dan tahun 2024

Kesimpulan:

Semua Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tersedia

b. Kualitas Perencanaan Kinerja

Kualitas perencanaan kinerja sudah disajikan dengan cukup baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 8,10 dari bobot nilai 9,00, yang ditandai dengan :

- 1) Dokumen Perencanaan telah diformalkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah
- 2) Dokumen Perencanaan telah dipublikasikan tepat waktu
- 3) Dokumen perencanaan kinerja sudah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu pada penetapan rencana aksi masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan kegiatan atau aksi aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- 4) Kinerja Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai

- 5) Ukuran keberhasilan (Tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable -tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 7) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang dan realistik.
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (Cascading). Yaitu pada perjanjian kinerja dari jabatan fungsional. Perjanjian kinerja harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari pejabat fungsional tersebut.
- 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerjaj strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 10) Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 11) Seluruh pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja

Kesimpulan :

Semua dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain

c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Pemanfaatan perencanaan kinerja belum disajikan dengan cukup baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 12,00 dari bobot nilai 15,00, yang ditandai dengan .

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dalam RENJA tahun 2023 (BAB IV).
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung sebagian Kinerja yang ingin dicapai, berupa Rencana Aksi tahun 2023 dan tahun 2024.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- 4) Capaian diatas 80% berupa Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi AKIP Tahun 203 dan Monev Aksi AKIP triwulan I tahun 2024.
- 5) Telah ada perbaikan/ penyempurnaan dari hasil peniiaian LKJiP tahun 2022 ke dokumen perencanaan RENJA tahun 2024.
- 6) Telah ada perbaikan/penyempurnaan sebagian besar dokumen Perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih balk.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, yaitu seluruh pejabat struktural sudah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2023.
- 8) Setiap Pegawai peduli dan berkomitmen menandatangani perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai tetapi kurang memahami sasaran kinerja yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian kinerja.

Kesimpulan .

Setiap Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

Rekomendasi :

Agar Kepala OPD memastikan kembali bahwa seluruh pegawai, dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, memahami sasaran kinerja organisasi dan bagaimana kontribusi masing-masing individu mendukung pencapaian tersebut.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 23,70 dari bobot nilai 30,00, Hal ini menunjukkan penilaian Pengukuran kinerja belum cukup memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang sudah dan belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan pengukuran kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 5,40 dari bobot nilai 6,00 yang ditandai dengan :

- 1) Pedoman Pengukuran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, berupa : perumusan masing-masing Indikator Kinerja dalam IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mempunyai SOP tentang pengumpulan data kinerja tetapi harus lebih dijelaskan mekanisme dan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Kesimpulan •

Semua Dokumen Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tersedia

b. Kualitas Pengukuran Kinerja

Kualitas pengukuran kinerja sudah di sajikan dengan cukup baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 6,30 dari bobot nilai 9,00, yang ditandai dengan :

- 1) Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, tertuang dalam LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala secara Triwulan, Semester dan tahunan
- 5) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yakni SIMAK Kinerja.
- 6) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi SIMAK KINERJA tetapi belum dapat menggambarkan secara detail dari pencapaian kinerja yang dilakukan.
- 7) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang tetapi tidak dilakukan secara rutin

Kesimpulan .

1. Tidak terdapat dokumentasi terkait adanya pimpinan (Kepala BPBD) selalu terlibat sebagai pengambil keputusan

2. Evaluasi internal yang dilakukan per triwulan, evaluasi dilakukan antara eselon III, eselon IV, fungsional dan staf

Rekomendasi :

1. Agar Kepala BPBD berperan aktif dalam siklus perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja.
2. Agar Kepala BPBD langsung melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berjenjang dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap permasalahan rencana aksi yang telah dilakukan

c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja.

Pemanfaatan pengukuran kinerja belum dilaksanakan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 10,50 dari bobot nilai 15,00, yang ditandai dengan :

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dengan bukti dukung Rekap SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur)
- 2) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 7) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 8) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- 9) Setiap unit/satuan kerja cukup memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 10) Sebagian pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Kesimpulan :

1. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi
3. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

Rekomendasi:

1. Agar Kepala BPBD lebih meningkatkan bekerja sama dengan BKPSDM dalam menerapkan sistem merit, dengan mempertimbangkan integrasi hasil pengukuran kinerja, rekam jejak, kompetensi, dan potensi dalam pengambilan keputusan SDM.
2. Agar Kepala BPBD menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja tiap bidang/seksi/subbagian. Unit yang secara konsisten menunjukkan kinerja

rendah atau tidak relevan dengan target strategis perlu ditinjau ulang keberadaannya, Agar Kepala OPD dapat mendorong bahwa setiap kajian kelembagaan, baik internal maupun yang dilakukan bersama BKPSDM/Bagian Organisasi, mensyaratkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai bahan utama analisis.

3. Agar Kepala BPBD terus memperkuat budaya kinerja melalui komunikasi rutin, pembinaan, dan keteladanannya agar semangat kepedulian terhadap hasil kinerja tetap konsisten di seluruh level organisasi.

3. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 11,25 dari bobot nilai 15,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Pelaporan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang sudah dan belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut •

a. Dokumen Laporan Kinerja

Penyajian Laporan kinerja disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 2,70 dari bobot nilai 3,00, yang ditandai dengan:

- 1) Laporan Kinerja sudah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu telah ditandatangani Oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4) Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) telah direviu oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu di website Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kesimpulan •

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tersedia

b. Kualitas Laporan Kinerja.

Kualitas laporan kinerja sudah disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 4,05 dari bobot nilai 4,50, yang ditandai dengan .

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja Tahun 2023
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahunan 2023
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tahun 2021 dan tahun 2022
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) tahun 2023.

- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Kesimpulan .

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan

c. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Pemanfaatan laporan kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 7,50 dari bobot nilai 4,50, yang ditandai dengan .

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan yaitu dengan memimpin rapat-rapat pembahasan kinerja.
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, berupa Renja Perubahan.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Kesimpulan .

- 1 . Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
5. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Rekomendasi •

- 1 . Agar Kepala BPBD secara aktif menunjukkan komitmen terhadap pentingnya laporan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk membahas capaian dan kendala dalam forum manajemen seperti rapat staf atau evaluasi bulanan.
2. Agar Kepala BPBD melakukan evaluasi rutin tentang seberapa jauh pemahaman dan perhatian pegawai terhadap laporan kinerja, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan.

3. Agar Kepala BPBD menginstruksikan kepada Kepala Bidang untuk memanfaatkan hasil laporan kinerja triwulan/bulanan dibahas secara rutin dalam rapat evaluasi sebagai dasar koreksi dan penyesuaian kegiatan berikutnya
 4. Agar Kepala BPBD menginstruksikan bahwa hasil laporan kinerja dijadikan dasar untuk mereview dan menyusun kembali prioritas penggunaan anggaran melalui rapat koordinasi antara perencana, PPK, bendahara, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana kegiatan.
 5. Agar Kepala BPBD mendorong perubahan paradigma bahwa kinerja bukan hanya sekedar laporan atau kewajiban administratif, tapi menjadi bagian dari identitas dan nilai kerja setiap pegawai.
4. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar 19.75 dari bobot nilai 25,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Evaluasi kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut .
- a. Pemenuhan Evaluasi
Pemenuhan evaluasi kinerja sudah disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 4,50 dari bobot nilai 5,00, yang ditandai dengan •
 - 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Kabupaten Padang Pariaman.
 - 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tidak secara rutin dilaksanakan secara berjenjang.

Kesimpulan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara rutin dan berjenjang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Kualitas Evaluasi

Kualitas evaluasi kinerja sudah disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 5,25 dari bobot nilai 7,50, yang ditandai dengan : 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar

- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi SIMAK KINERJA
- 5) Pemantauan Rencana Aksi sudah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
- 6) Hasil evaluasi Rencana Aksi sudah menunjukkan perbaikan setiap periode.'

Kesimpulan :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memuat pendalaman yang memadai

Rekomendasi •

Agar Kepala BPBD, dan seluruh staf melakukan pendalaman evaluasi

akuntabilitas kinerja lebih spesifik sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong tim evaluasi untuk menggunakan metode seperti 5 Whys atau Fishbone Diagram dalam mengevaluasi deviasi kinerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan menyentuh sumber masalah utama.

c. Agar Kepala BPBD, dan seluruh staf melakukan pendalaman evaluasi akuntabilitas kinerja lebih spesifik sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong tim evaluasi untuk menggunakan metode seperti 5 Whys atau Fishbone Diagram dalam mengevaluasi deviasi kinerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan menyentuh sumber masalah utama. Pemanfaatan Evaluasi Pemanfaatan evaluasi kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 10,00 dari bobot nilai 12,50, yang ditandai dengan .

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar (80%) telah ditindaklanjuti, selebihnya masih dalam proses tindak lanjut.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
- 4) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, seperti Penggunaan Aplikasi SIMAK KINERJA

Kesimpulan:

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Rekomendasi •

Agar Kepala BPBD memastikan dan mendorong bahwa seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak hanya disimpan sebagai dokumen, tetapi dijadikan bahan utama dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program.

b. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. PKO pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil:

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025**

NO		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIA	KOREKSI NORMALISASI CAPAIAN PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP	Nilai AKHIR CAPAIAN
		2	3	4	5	6	7	8	8
1		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat			100%	100%	0%	100%
2		Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara Yang memperoleh layanan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	119%	119%	110%	0%	110%

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025**

			pencegahan dan						
NO		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN	KOREKSI NORMALISASI CAPAIAN PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP	Nil-AI AKHIR CAPAIAN
1		2	3	4	5	6	7	8	8
3		Meningkatnya Pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	0%	100%

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2025**

4		Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	80%	100%	125%	110%	0%	110%
		Total Capaian PK							420%
		Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata Rata Capaian PK							105%
		Predikat PKO							ISTIMEWA

Kesimpulan:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata rata capaian Perjanjian Kinerja yaitu 105% dengan Predikat Penilaian Kinerja Organisasi adalah Istimewa, yang berarti Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.

B. Rekomendasi

Atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman agar melakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 1 . Agar Kepala OPD memastikan kembali bahwa seluruh pegawai, dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, memahami sasaran kinerja organisasi dan bagaimana kontribusi masing-masing individu mendukung pencapaian tersebut.
2. Agar Kepala BPBD berperan aktif dalam siklus perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja.
- 3, Agar Kepala BPBD langsung melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berjenjang dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap permasalahan rencana aksi yang telah dilakukan
4. Agar Kepala BPBD lebih meningkatkan bekerja sama dengan BKPSDM dalam menerapkan sistem merit, dengan mempertimbangkan integrasi hasil pengukuran kinerja, rekam jejak, kompetensi, dan potensi dalam pengambilan keputusan SDM.
5. Agar Kepala BPBD menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja tiap bidang/seksi/subbagian. Unit yang secara konsisten menunjukkan kinerja rendah atau tidak relevan dengan target strategis perlu ditinjau ulang keberadaannya, Agar Kepala OPD dapat mendorong bahwa setiap kajian kelembagaan, baik internal maupun yang dilakukan bersama BKPSDM/Bagian Organisasi, mensyaratkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai bahan utama analisis.
6. Agar Kepala BPBD terus memperkuat budaya kinerja melalui komunikasi rutin, pembinaan, dan keteladanannya agar semangat kepedulian terhadap hasil kinerja tetap konsisten di seluruh level organisasi.
7. Agar Kepala BPBD secara aktif menunjukkan komitmen terhadap pentingnya laporan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk membahas capaian dan kendala dalam forum manajemen seperti rapat staf atau evaluasi bulanan.
8. Agar Kepala BPBD melakukan evaluasi rutin tentang seberapa jauh pemahaman dan perhatian pegawai terhadap laporan kinerja, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan.
9. Agar Kepala BPBD menginstruksikan kepada Kepala Bidang untuk memanfaatkan hasil laporan kinerja triwulan/bulanan dibahas secara rutin dalam rapat evaluasi sebagai dasar koreksi dan penyesuaian kegiatan berikutnya
10. Agar Kepala BPBD menginstruksikan bahwa hasil laporan kinerja dijadikan dasar untuk mereview dan menyusun kembali prioritas penggunaan anggaran melalui rapat koordinasi antara perencanaan, PPK, bendahara, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana kegiatan.
11. Agar Kepala BPBD mendorong perubahan paradigma bahwa kinerja bukan hanya sekadar laporan atau kewajiban administratif, tapi menjadi bagian dari identitas dan nilai kerja setiap pegawai.

12. Agar Kepala BPBD, dan seluruh staf melakukan pendalaman evaluasi akuntabilitas kinerja lebih spesifik sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong tim evaluasi untuk menggunakan metode seperti 5 Whys atau Fishbone Diagram dalam mengevaluasi deviasi kinerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan menyentuh sumber masalah utama.

13. Agar Kepala BPBD memastikan dan mendorong bahwa seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak hanya disimpan sebagai dokumen, tetapi dijadikan bahan utama dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program.

**BAB III
PENUTUP**

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Kami menghargai upaya Inspektur dan Tim SAKIP Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR,
HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CG
Pembina Tingkat I
NIP. 19811226 199901 1 001

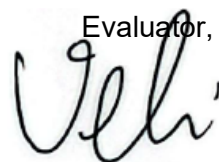
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 BPBD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	